

# Harga Sebuah Pilihan: Strategi PKS dan Partai Demokrat Menata Raut Wajah

Desideria Setya Mentari

KATA PENGANTAR:  
**PROF. PURWO SANTOSO**



**Harga Sebuah Pilihan: Strategi PKS  
dan Partai Demokrat Menata Raut Wajah**

Hak cipta © Penerbit PolGov, 2018

*All rights reserved*

Penulis: **Desideria Setya Mentari**

Editor: **Fitria Nurhayati**

Pemeriksa Aksara: **Fazrin Khairul Saleh**

Desain Sampul: **Hamzah Ibnu Dedi**

Tata Letak Isi: **M. Baihaqi Lathif**

Penyelaras Akhir: **Mahesti Hasanah**

Cetakan I, Mei 2018

**Diterbitkan oleh Penerbit PolGov**

*Penerbit PolGov* khusus menerbitkan buku-buku politik dan pemerintahan, berada di bawah payung *Research Centre for Politics and Government* (PolGov). PolGov adalah lembaga riset dan publikasi dari Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM. Saat ini PolGov berfokus ke dalam lima tema kunci sesuai dengan kurikulum DPP, yaitu: 1) Kekuasaan, Kesejahteraan, dan Demokrasi; 2) Politik Desentralisasi; 3) Tata Kelola Industri Ekstraktif; 4) Tata Kelola Pemilu; dan 5) Tata Kelola Perbatasan.

Lt. 4 Gedung Fisipol UGM

Jl. Sosio Yustisia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

<http://jpp.fisipol.ugm.ac.id>

Telp./Fax: (0274) 552212

Surel: [penerbit.polgov@ugm.ac.id](mailto:penerbit.polgov@ugm.ac.id)

Pustaka Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Desideria Setya Mentari

Harga Sebuah Pilihan: Strategi PKS dan Partai Demokrat Menata Raut Wajah

Penulis: Desideria Setya Mentari; Editor: Fitria Nurhayati

Cet.1 — Yogyakarta: Penerbit PolGov, April 2018

xiv + 114 hlm; 14,5 x 21.cm

ISBN: 978-602-60933-8-7

1. Partai/Politik I. Judul

# KATA PENGANTAR

## Melembagakan Partai Politik, Mengarungi Pilihan-Pilihan Dilematis

**Prof. Purwo Santoso**

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan  
(DPP), UGM

**M**enulis kata pengantar dalam publikasi suatu skripsi, bagi saya, adalah kepuasan tersendiri. Naskah yang ada di tangan Anda ini, pengemasan ulang hasil belajar yang boleh dibilang berdarah-darah. Selesaiannya penulisan naskah ini dalam format skripsi atau tugas akhir untuk jenjang pendidikan sarjana (S1), sebetulnya sesuatu banget, suatu *accomplishment*. Penyajiannya dalam format buku, tentulah lebih membanggakan.

Sebagai pendamping penulisan naskah ini, saya pun ikut merasa lega. Alhamdulillah.

\*\*\*

Tulisan ini diawali dengan asumsi sederhana, bahwa upaya untuk mendirikan, membesarkan, dan menjalankan partai politik, tidaklah mudah. Ada pasang surut, dan lebih dari itu, ada hal-hal dilematis yang harus dipilih. Ironisnya, kesulitan ini tidak menjadi kesadaran bagi kita yang begitu banyak menuntut kepada partai politik. Sebagai penulis, Desideria Setya Mentari mengajak kita untuk berempati, betapa susahny mendirikan dan melembagakan partai politik.

Penulis buku ini memang tidak secara eksplisit menggugat publik, khususnya dalam menyikapi partai politik. Namun, setelah selesai membaca buku ini dan menyempatkan diri untuk merenung, tulisan ini sebetulnya menggoda kita untuk menarik kesimpulan yang nakal: dalam berpemerintahan, kita ini sebetulnya masih kekanak-kanakan. Mengapa? Di satu sisi publik membayangkan, partai politik bisa menjalankan fungsi-fungsi normatif yang dicanangkan, dengan serta merta. Imaji ini, setara dengan ekspektasi seorang anak, ketika berharap semua harapannya dipenuhi orang tuanya. Susahnya mengelola ekspektasi publik ini, membuat politisi partai politik tidak tahan godaan: ambil jalan pintas.

Pesan yang secara jelas disajikan Desideria di dalam buku ini adalah bahwa, dalam menjalankan organisasinya, partai politik selalu dihadapkan pada berbagai pilihan yang bisa menjebak. Dia mengacu pada pengalaman, tepatnya perjalanan kematangan PKS dan Partai Demokrat sebagai jembatan interaksi antara negara

dengan rakyatnya. Dengan fokus pada kedua partai politik ini, nuansa dilematis dalam perjalanan pengorganisasian partai dapat dipetakan secara gamblang.

Telaah institusionalisasi kedua partai-PKS dan Partai Demokrat-menunjukkan gejala yang menarik. Masing-masing partai politik menempuh langkah yang berkebalikan, namun pada saat yang sama menghadapi kesulitan yang sebaliknya. Dengan menyandingkan kedua kasus, dilema pelembagaan partai politik ini bisa dijelaskan secara lebih koheren.

Dengan melihat pilihan politik berbeda dari dua partai yang memiliki karakteristik dan corak yang sangat berbeda, studi ini telah menunjukkan bahwa setiap pilihan dari masing-masing partai akan memberikan konsekuensi yang harus dipenuhi. Ketika partai tidak mampu memenuhi konsekuensi tersebut, partai politik dihadapkan pada situasi yang dilematis. Konsekuensi-konsekuensi itu tidak dapat dielakkan karena adanya serangkaian hal yang memang tidak bisa dipenggal.

Dalam menelaah dan menemukan gambaran menarik di atas, Desideria meminjam konsep 'tiga wajah partai' sebagaimana disampaikan Katz dan Mair: wajah di pemerintahan, wajah di dalam pengorganisasian, dan penampilannya di akar rumput (konstituens). Tiga wajah partai mensyaratkan komponen-komponen yang semestinya dipenuhi oleh partai politik agar seimbang. Studi ini menunjukkan bahwa komponen antarwajah partai saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Partai diharapkan mengelola ketiga wajah partai dengan baik. Kesan bahwa tiga wajah partai selama ini diperlakukan sebagai hal yang terpisah-pisah, harus ditinggalkan.

PKS dan Partai Demokrat memiliki pilihan berbeda dalam pengorganisasian partainya. PKS membangun organisasi dari dasar, yakni militansi akar rumput. Sedangkan Partai Demokrat membangun organisasinya dari puncak, yakni memanfaatkan personalistik tokoh. Sejak awal berdiri, PKS memilih sebagai partai ideologis dan Partai Demokrat memilih sebagai partai *catch-all*. Hal tersebut menunjukkan perbedaan mendasar dalam pengorganisasian PKS dan Partai Demokrat. Tetapi, ada problema yang tidak mampu dihindari oleh masing-masing partai karena pilihan politik yang diambil.

Problema partai hadir karena ketidakmampuan partai membayar konsekuensi dari pilihan politiknya. PKS memiliki organisasi kokoh, tetapi kesulitan memperluas basis massa. Sedangkan Partai Demokrat menguasai jabatan publik dalam waktu singkat, tetapi memiliki organisasi yang rapuh. Hal tersebut disebabkan kedua partai hanya memenuhi satu kaitan di tiga wajah partai. PKS kuat pada kaitan wajah di pusat dan akar rumput, sedangkan Partai Demokrat kuat pada kaitan wajah di jabatan publik dan akar rumput. Padahal, memiliki kekuatan pada satu kaitan saja tidak cukup bagi partai untuk dapat *survive*. Ketidakmampuan partai memenuhi kaitan antarwajah menyebabkan organisasi partai tidak berjalan seimbang, sehingga membawa partai pada kondisi dilematis dan menyelesaikan problema secara pragmatis.

PKS memilih menjadi partai ideologis, sehingga ceruk pemilihnya telah dibatasi sejak awal. Dalam prosesnya, partai menelan ideologinya sendiri dengan mengumumkan diri menjadi partai terbuka, guna memenuhi kebutuhannya dalam politik kursi. Padahal, PKS sejak awal telah berupaya membangun partai

kader ideologis. Semestinya, partai meningkatkan kemampuan kader dalam mengolah ide. Hal tersebut berarti memperkuat kaitan di wajah pusat dan jabatan publik. Selanjutnya, para kader partai perlu memiliki keahlian dalam membangun isu politik, yang mana akan mengisi kaitan wajah di jabatan publik dan akar rumput.

Partai Demokrat memilih menjadi partai *catch-all*, ditunjukkan dengan ideologi partai, yakni nasionalis-religius. Kemampuan partai dalam mengelola popularitas membuat partai mampu menguasai jabatan publik dalam waktu cukup singkat. Tetapi, ketika partai mengalami konflik internal dan kader-kadernya terjerat kasus korupsi, internal partai rapuh diikuti dengan penurunan yang cukup drastis pada elektabilitas partai. Kemudian, partai mengandalkan kekuatan personalistik tokohnya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Meskipun partai politik berorientasi pada kekuasaan, tetapi tidak dapat melepaskan diri pada hakikatnya sebagai organisasi dimana membutuhkan sistem yang kuat dalam menggerakkan roda partai. Kekuatan Partai Demokrat pada wajah di jabatan publik dan akar rumput saja tidak cukup. Partai semestinya membangun organisasi yang tersistem untuk memenuhi dua kaitan wajah lainnya, yakni (1) kaitan wajah di pusat dan akar rumput, serta (2) kaitan wajah di pusat dan jabatan publik. Dengan begitu, partai dapat mengurangi ketergantungan pada personalistik tokoh dan memiliki penjangkaran di akar rumput.

\*\*\*

Sebagai kata penutup, kita diingatkan oleh Desideria, organisasi politik bisa saja tampil berbeda-beda, begitu juga proses pelembagaannya. Hal ini pun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, terlepas dari itu semua, ada harga yang mesti dibayar dari ketidakmampuan partai memenuhi konsekuensi atas pilihan politik yang diambil. Tiga wajah partai saling terkait dan menjadi penting bagi partai untuk memenuhi komponen pada setiap kaitan wajah. Hal tersebut dapat memberikan keseimbangan dalam menjalankan organisasi dan meminimalisir kondisi-kondisi dilematis yang dihadapi partai politik.

Pelembagaan partai politik adalah tantangan untuk kita hadapi bersama. Selamat membaca!

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Gambar .....	xi
Daftar Tabel .....	xiii
Daftar Grafik .....	xiv
BAB I - Pilihan Politik dan Konsekuensi yang Dihadapi	1
A. Menata Raut Wajah: Keterkaitan Antarwajah Partai Politik .....	6
B. Keterkaitan Ketiga Wajah Partai.....	7
B.1. Kaitan Wajah di Pusat dan Akar Rumput .....	7
B.2. Kaitan Wajah di Pusat dan Jabatan Publik.....	9
B.3. Kaitan Wajah di Akar Rumput dan Jabatan Publik	10
BAB II - Problema Pengorganisasian Partai Politik .....	15
A. Permasalahan Kepartaian di Indonesia .....	18
B. Partai Mencari Bentuk Ideal .....	24
C. Problema Partai Beda Corak .....	26

BAB III - Pilihan Politik PKS dan Partai Demokrat .....	35
A. PKS: Pragmatism Partai Ideologis .....	35
A.1. PKS Sang Partai Dakwah .....	37
A.2. Misi Militansi PKS .....	40
A.3. Dinamika Suara PKS .....	44
A.4. Tawar Menawar Ideologi dan Partai Terbuka ...	46
B. Partai Demokrat : Partai Bermodal Popularitas .....	51
B.1. Demokrat ya SBY , SBY ya Demokrat.....	53
B.2. Misi Partai Demokrat: Mengusung SBY .....	56
B.3. Dinamika Suara Partai Demokrat.....	60
B.4. Organisasi Rapuh: Oligarki sebagai Harapan...	63
 BAB IV - Partai Mengelola Dilema .....	 67
A. Harga dari Sebuah Pilihan .....	67
A.1. PKS dan Akar Rumput .....	72
A.2. Partai Demokrat dan Jabatan Publik .....	79
B. Terobosan bagi PKS dan Partai Demokrat .....	84
B.1. PKS Sebagai Pengusung Ide .....	84
B.2. Partai Demokrat Membangun Organisasi.....	90
 BAB V - Penutup .....	 97
 Daftar Pustaka.....	 103
Indeks .....	111
Tentang Penulis .....	113

# Daftar Gambar

• Gambar 1.1 Konseptualisasi Keterkaitan Tiga Wajah Partai .....	7
• Gambar 1.2 Proses melaksanakan fungsi partai politik di grassroot menurut Dalton and Wattenberg.....	8
• Gambar 1.3 Konseptualisasi Keterkaitan Wajah Partai di Pusat dan Akar Rumput.....	11
• Gambar 1.4 Konseptualisasi Keterkaitan Wajah Partai di Pusat dan Jabatan Publik.....	12
• Gambar 1.5 Konseptualisasi Keterkaitan Wajah Partai di Akar Rumput dan Jabatan Publik....	12
• Gambar 2.1 Dimensi afeksi : Party ID pemilih terhadap partai politik .....	19
• Gambar 2.2 Partai politik sebagai saluran aspirasi rakyat .....	19
• Gambar 2.3 Trend Dukungan Partai.....	31
• Gambar 2.4 Ketua Umum Partai Demokrat Dukungan Rakyat.....	32
• Gambar 3. 1 Jenjang Kaderisasi Formal PKS .....	41
• Gambar 3.2 Urutan Pilihan Politik PKS .....	50

- Gambar 3.3 Urutan Pilihan Politik Partai Demokrat 64
- Tabel 4.1 Perbandingan Pilihan Politik dan Dilema PKS dan Partai Demokrat ..... 68
- Gambar 4.1 Konseptualisasi Keterkaitan Tiga Wajah PKS dan Partai Demokrat ..... 71
- Gambar 4.2 Kaitan Wajah Partai di Pusat dan Akar Rumput PKS ..... 73
- Gambar 4.4 Konseptualisasi Keterkaitan Antarwajah PKS ..... 74
- Gambar 4.5 Kaitan Wajah di Pusat dan Jabatan Publik Partai Demokrat ..... 80
- Gambar 4.6 Konseptualisasi Kaitan Tiga Wajah pada Partai Demokrat ..... 81
- Gambar 4.7 Materialisme Ideologi Politik ..... 86
- Gambar 4.8 Bagan Terciptanya Isu Politik ..... 87
- Gambar 4.9 Urutan Logika Pikir Terobosan untuk PKS 88
- Gambar 4.10 Ideologi dan Kekuasaan ..... 89
- Gambar 4.11 Manajemen SDM dalam Partai Politik 92

# Daftar Tabel

- Tabel 1 Persentase Perolehan Suara Partai Islam pada Pemilu 2004-2014 ..... 28
- Tabel 2 Pilihan Politik dan Dilema yang Dimiliki PKS dan Partai Demokrat ..... 68
- Tabel 3 Terobosan Keluar dari Dilema bagi PKS dan Partai Demokrat ..... 95

# Daftar Grafik

- Grafik 3.1 Bentuk-bentuk Aksi Kolektif ..... 75

# BAB I

## Pilihan Politik dan Konsekuensi yang Dihadapi

Partai politik sebagai suatu organisasi sosial menganut hukum daur hidup (*life-cycle*): partai politik dilahirkan, tumbuh dan berkembang, jika mengalami kemandekan dapat ditinggalkan pendukungnya.<sup>1</sup> Kemampuan partai mengelola organisasi terhadap perubahan dan tuntutan lingkungan menjadi salah satu faktor partai bisa bertahan di panggung politik. Perubahan politik dan sosial mendorong partai politik saling bersaing mempertahankan eksistensi. Sistem multipartai yang diterapkan Indonesia mendukung persaingan antarpartai, sebab tidak ada partai tunggal yang berkuasa. Kemampuan bertahan di panggung politik utamanya ditunjukkan melalui keberhasilannya meraup suara dalam pemilu. Partai kemudian saling berebut

---

1 Firmanzah. 2007. *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, hlm 221.

pangsa suara dengan mendongkrak dukungan bagi partainya sendiri dan menggerogoti suara dari pesaing mereka.<sup>2</sup> Dari hasil kemenangannya dalam pemilu, seperti yang dikatakan Giovanni Satori, partai mendapat legitimasi sebagai struktur perantara utama antara masyarakat dan pemerintah.<sup>3</sup>

Dalam melaksanakan pengorganisasiannya, partai dihadapkan pada pilihan-pilihan politik, yang setiap pilihannya memiliki konsekuensi. Ketidakkampuan partai memenuhi konsekuensi dapat membawa partai pada dilema. Pengorganisasian PKS dan Partai Demokrat dapat menjadi subjek menarik dalam menunjukkan keterkaitan pilihan politik dan dilema partai. Keduanya lahir di era yang sama, yakni pada era reformasi, namun memiliki strategi dan sejarah yang berbeda. PKS identik sebagai partai ideologis dengan ideologi Islamnya, sedangkan Partai Demokrat menunjukkan ciri partai *catch all* dengan ideologi Nasionalisme Religius.

Sejarah berdirinya PKS berawal dari organisasi dakwah, kemudian menjadi Partai Keadilan (PK), hingga akhirnya resmi menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan menjual isu-isu politik yang lebih cair, dibandingkan dengan masih menjadi PK. Sedangkan sejarah berdiri Partai Demokrat cenderung cukup singkat dengan diinisiasi oleh kelompok pengusaha dan

- 
- 2 Wolnetz, Steven B.2014.*Sistem Partai dan Jenis-Jenis Sistem Partai*. dalam Richard S.Katz dan William Crotty(ed.),*Handbook Partai Politik*.Bandung: Penerbit Nusa Media, hlm. 83.
  - 3 White, John Kenneth.2014.*Apakah Partai Politik Itu?*. dalam Richard S.Katz dan William Crotty(ed.),*Handbook Partai Politik*.Bandung: Penerbit Nusa Media, hlm 7.

akademisi yang mendukung Susilo Bambang Yudhoyono menjadi calon presiden. Perjalanan politik kedua partai tersebut pada pemilu perdananya terhitung sukses dan membuat keduanya mendapat julukan sebagai *the rising star*. Bahkan hingga sekarang, PKS maupun Partai Demokrat merupakan dua partai yang cukup diperhitungkan posisinya. Tetapi, baik PKS maupun Partai Demokrat sama-sama terjebak dalam kondisi yang dilematis. PKS sebagai partai ideologis kesulitan memperluas basis massanya yang mengakibatkan perolehan suara yang cenderung stagnan. Sedangkan Partai Demokrat menjadi partai yang bergantung pada popularitas dan personalistik SBY. PKS dan Partai Demokrat menjadi sampel dari dua partai di Indonesia yang memiliki performa cukup baik dalam sejarah perpolitikannya, tetapi sama-sama memiliki problema dalam pengelolaan organisasi politiknya.

PKS dikenal memiliki anggota yang militan dan memiliki sistem kaderisasi serta penjurangan karir partai yang tertata.<sup>4</sup> Jenjang karir membuat regenerasi kepemimpinan di PKS rutin dilakukan dan tidak memengaruhi eksistensi dari PKS itu sendiri. Pada saat internal PKS diterpa isu negatif dan citra anti korupsinya terancam karena tokohnya turut terjerat kasus korupsi, perolehan suara partai pada pemilu terakhir, yakni tahun 2014, tidak mengalami kemerosotan tajam. Keberlangsungan partai tidak semata mengandalkan tokoh, melainkan sistem pengorganisasian partai yang solid. Hal tersebut menunjukkan bahwa PKS memiliki dukungan dari massa tradisional, yakni pendukung partai yang berpeluang kecil untuk berpindah

---

4 *Ibid.*,

preferensi pilihan terhadap partai lain, sehingga meskipun isu negatif menerpa tubuh partai, tidak terlalu memengaruhi jumlah dukungan terhadap partai. Namun di luar kekuatan tersebut, PKS mengalami problem dalam meningkatkan jumlah dukungan di luar basis massa tradisionalnya.

Hal berbeda terjadi pada Partai Demokrat yang hadir dengan ketokohan Susilo Bambang Yudhoyono. Kegagalan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi wakil presiden Megawati di tahap akhir pemilihan dianggap sebagai peluang politik. Susilo Bambang Yudhoyono berinisiatif membentuk partai dan mendapat dukungan dari para pengusaha. Vence Rumangkang merupakan salah satu tokoh pengusaha yang memprakarsai dan mendirikan Partai Demokrat hingga resmi terdaftar. Susilo Bambang Yudhoyono yang kemudian lebih dikenal dengan nama singkatannya, SBY, telah lebih dahulu dikenal masyarakat dibandingkan dengan nama Partai Demokrat. Dengan demikian, popularitas SBY lebih dulu naik daripada Partai Demokrat.<sup>5</sup>

Sosok SBY menjadi pendulang suara bagi Partai Demokrat pada pemilu 2004 dan pemilu 2009. Namun pada pemilu 2014 suara partai merosot. Salah satu faktor penurunan elektabilitas partai Demokrat tidak lain karena sepanjang tahun 2009 sampai tahun 2014 banyak tokoh partai Demokrat terjerat kasus korupsi, terutama kasus Anas Urbaningrum yang saat itu tengah menjabat Ketua Umum Partai Demokrat. Saat itu, SBY menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan, serta

---

5 Urbaningrum, Anas.2010.*Revolusi Sunyi "Mengapa Partai Demokrat dan SBY Menang dalam Pemilu 2009?"*.Bandung:Penerbit Mizan,hlm.119.

Ketua Majelis Tinggi Partai secara *ex-officio*.<sup>6</sup> Majelis Tinggi Partai merupakan posisi puncak dalam struktur organisasi Partai Demokrat di AD/ART tahun 2010-2015. Hal tersebut menunjukkan bahwa sosok SBY tetap berpengaruh di partai dan berada pada posisi sentral, sekalipun bukan ketua umum. Hanya saja, di mata pendukungnya, hal tersebut tidak berpengaruh banyak, dan menyebabkan perolehan suara yang menurun drastis pada pemilu 2014. Penurunan suara partai Demokrat menjadi bukti bahwa citra partai sangat memengaruhi elektabilitasnya. Partai Demokrat yang mengandalkan popularitas dan nama besar tokoh untuk membangun citranya menunjukkan bahwa partai memiliki organisasi yang rapuh.

Manakah yang lebih baik: Organisasi kokoh, tetapi perolehan suara cenderung stagnan, yang berarti pendukung terbatas pada pemilih tradisional, atau kemenangan kilat yang didongkrak popularitas, tetapi selanjutnya diikuti keruntuhan karena ketidakmampuan partai menjadi perekat kepentingan-kepentingan anggotanya? Kondisi tersebut bukanlah kondisi ideal yang diharapkan PKS ataupun Partai Demokrat. Tetapi kedua partai harus menjalani kondisi dilematis sebagai harga yang harus dibayar karena ketidakmampuan partai memenuhi konsekuensi dari pilihan yang telah diambil.

---

6 Partai Demokrat.2010.*Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat*, hlm.7.

## A. Menata Raut Wajah: Keterkaitan Antarwajah Partai Politik

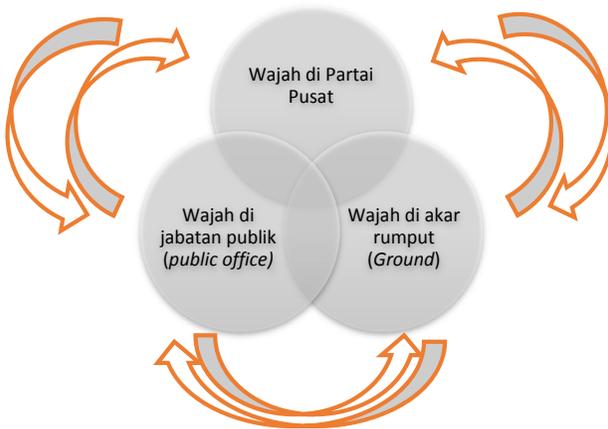
Katz dan Mair menjelaskan keterkaitan antara pilihan politik dengan dilema pengorganisasian partai dalam konsep tiga wajah partai yang mewakili setiap komponen pengorganisasian partai: wajah partai di pusat (*organization*), wajah partai di jabatan publik (*public office*), dan wajah partai di akar rumput (*ground*).<sup>7</sup> Ketiganya merupakan unsur yang saling terkait, dan idealnya, partai dituntut memenuhi setiap komponen masing-masing wajah.

Wajah partai di organisasi merujuk pada fungsi partai sebagai organisasi politik yang memengaruhi kegiatan internal partai. Wajah partai di akar rumput adalah ketika partai bersentuhan langsung dengan konstituen/pemilih, sehingga mengarah pada bagaimana partai politik menghubungkan individu dengan demokrasi. Wajah partai di jabatan publik merujuk pada bagaimana partai politik dalam mengelola dan terlibat di pemerintahan. Partai sebagai organisasi politik menjadi ideal jika memiliki organisasi yang kokoh, konstituen yang mengakar, dan kader pengisi jabatan publik yang kompeten serta memiliki kredibilitas. Ketiganya saling berkaitan dan harus simultan. Ketika partai politik tidak mampu memenuhi ketentuan pada salah satu wajah, maka partai akan mengalami permasalahan dalam menjalankan organisasinya.

---

7 Katz and Mair.1993.*The Evolution of Party Organizations in Europe: The Three Faces of Party Organization*, Journal The American Review of Politics, Vol 14., hlm 596.

Berikut adalah gambar konseptualisasi keterkaitan antara masing-masing wajah partai.



*Gambar 1.1 Konseptualisasi Keterkaitan Tiga Wajah Partai, sumber: penulis*

## **B. Keterkaitan Ketiga Wajah Partai**

### **B.1. Kaitan Wajah di Pusat dan Akar Rumput**

Wajah partai di pusat menjadi poros dari wajah partai di akar rumput dan jabatan publik. Seperti dikatakan oleh Katz dan Mair, partai di kantor pusat dapat menarik sumber daya dari wajah lainnya, sehingga menjadi lokus dominan keputusan dalam partai. Hal tersebut dikarenakan wajah partai politik di pusat berkaitan dengan kemampuan partai mengelola organisasi.

Wajah partai di akar rumput dicirikan dengan keanggotaan sukarela seperti aktivis reguler, pendukung loyalis, maupun orang-orang yang tidak terdaftar secara resmi sebagai anggota

partai.<sup>8</sup> Wajah partai di akar rumput berkaitan dengan kemampuan partai menarik massa pendukung dan pemilih yang mengakar di masyarakat. Menurut Dalton dan Wattenberg, terdapat empat fungsi partai yang termasuk dalam fungsi partai di akar rumput, yakni menyederhanakan pilihan, pendidikan politik, membangkitkan simbol identifikasi dan loyalitas, serta memobilisasi massa.<sup>9</sup> Apabila dicerna lebih dalam, maka fungsi yang menunjukkan wajah partai di akar rumput tersebut dapat dimaknai sebagai proses partai politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organisasi.



*Gambar 1.2 Proses melaksanakan fungsi partai politik di grassroots menurut Dalton and Wattenberg.*

Partai hadir untuk menyederhanakan pilihan bagi masyarakat dengan platform ataupun ideologi yang dibawa. Partai politik pada wajah di akar rumput dituntut untuk membangun hubungan yang erat dan mengakar dengan individu. Biasanya, hubungan tersebut terikat dengan garis ideologis, di mana bagi partai politik, ideologi adalah pengikat sosial serta berfungsi untuk membedakan partai yang satu dengan yang lain. Dengan demikian, partai dapat

---

8 *Ibid.*,

9 Pamungkas, Sigit.2011.*Partai Politik: teori dan praktik di Indonesia*.Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism .,hlm 16.,

melaksanakan pendidikan politik dan memobilisasi masyarakat untuk terlibat dalam pemilihan umum.

Dalam kepentingan membangun loyalitas, partai di akar rumput diharapkan dapat berdifusi di seluruh wilayah negara, yakni menyebarkan dan menanamkan ide-idenya kepada seluruh anggota ataupun partisan partai. Hal tersebut diwujudkan secara organisasi, melalui kongres di tingkat nasional dan tingkatan lain, serta pertemuan rutin di berbagai tingkatan organisasi partai. Kegiatan di segala tingkat tersebut dilaksanakan berdasarkan aturan dasar yang sebelumnya telah ditetapkan oleh partai politik di pusat.

## **B.2. Kaitan Wajah di Pusat dan Jabatan Publik**

Wajah partai di jabatan publik berkaitan dengan individu yang dicalonkan partai untuk dipilih masyarakat melalui pemilu. Sedangkan wajah di pusat adalah untuk melaksanakan fungsi organisasi, di antaranya rekrutmen politik, kaderisasi, dan seleksi kandidat. Pejabat publik merupakan representasi partai di pemerintahan. Kemampuan partai melaksanakan fungsi sebagai organisasi menjadi penting karena memengaruhi kualitas kader di jabatan publik dalam mengelola persoalan pemerintahan. Partai perlu menjamin kualitas kader yang akan dicalonkan untuk pemilihan, yakni kader-kader yang memiliki kredibilitas, loyalitas, dan kompetensi untuk mengisi jabatan publik. Selain itu, partai juga perlu memastikan bahwa kadernya memahami visi-misi partai serta sejalan dengan ideologi partai. Sebab, kader-kader partai yang duduk di jabatan publik merupakan perwakilan partai, sehingga segala tindakannya selama menjabat akan berpengaruh terhadap baik buruknya citra partai.

Wajah partai politik di pusat berisi tugas partai terkait manajemen sumber daya manusia (SDM). Dalam kaitannya dengan wajah partai di jabatan publik, partai melaksanakan rekrutmen dan seleksi kandidat untuk diajukan sebagai calon yang dapat dipilih oleh konstituen di pemilu. Pippa Noris mengatakan, bahwa persyaratan pencalonan posisi jabatan publik, selain persyaratan hukum negara juga diatur melalui aturan internal, konstitusi, dan anggaran partai. Partai memiliki aturan dan mekanisme terkait pemilihan perwakilan yang akan dicalonkan di pemilu. Umumnya, seorang calon harus sudah menjadi anggota partai selama periode tertentu untuk memastikan loyalitasnya pada partai dan memahami kebijakan partai.<sup>10</sup> Loyalitas dan pemahaman kader di jabatan publik terhadap kebijakan partai ditunjukkan ketika partai melaksanakan agregasi dan artikulasi kepentingan, yakni mengumpulkan dan menentukan isu-isu penting atau aspirasi dari masyarakat, aspirasi tersebut kemudian diwujudkan menjadi kebijakan oleh kader yang berada di jabatan publik. Oleh sebab itu penting bagi partai memiliki hubungan yang erat dengan kadernya di pemerintah dan begitu pula sebaliknya, karena tuntutan memenuhi kepentingan dari para pemilihnya.

### **B.3. Kaitan Wajah di Akar Rumput dan Jabatan Publik**

Wajah partai di jabatan publik berkaitan dengan kemampuan partai mengirimkan wakilnya di pemerintahan. Sedangkan wajah partai di akar rumput berkaitan dengan kemampuan

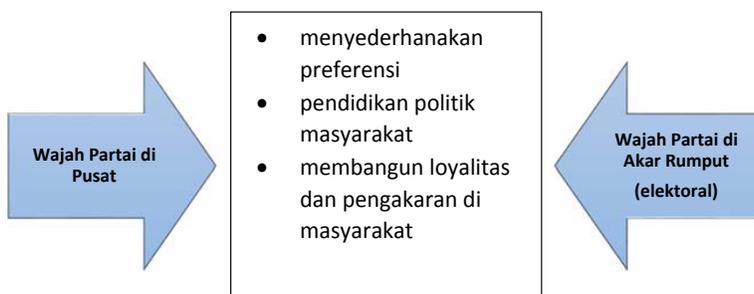
---

10 Pippa Norris.2014.*Recruitmen*, dalam Richard S.Katz dan William Crotty(ed.),*Handbook Partai Politik*.Penerbit Nusa Media, Bandung.,hlm.149.

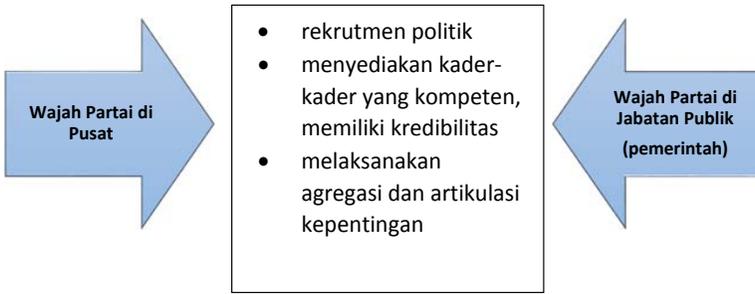
partai menghubungkan antara pemilih dengan partai. Penting bagi partai memiliki kemampuan menarik konstituen untuk bisa menempatkan kadernya di pemerintahan, dengan menjaga hubungan baik dengan pemilih.

Anggota yang berada di jabatan publik menjaga legitimasi dengan realisasi kebijakan atas apa yang telah dijanjikan pada konstituen saat masa kampanye. Selain itu, saat masa reses, anggota legislatif bisa kembali mengumpulkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan publik. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kepercayaan konstituen. Jika perwakilan yang dipilih merealisasikan kebijakan terkait dengan aspirasi yang diberikan, tingkat kepuasan dan kepercayaan terhadap pejabat publik dan partai akan meningkat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa keterkaitan antara wajah di akar rumput dan jabatan publik ada pada kemampuan partai menjaga legitimasi, dengan menjamin terwujudnya kepentingan di akar rumput.

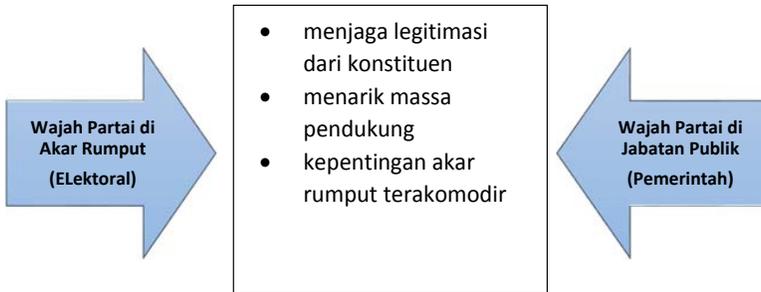
### **Konseptualisasi Keterkaitan Wajah Partai untuk Survivalitas Partai**



*Gambar 1.3 Konseptualisasi Keterkaitan Wajah Partai di Pusat dan Akar Rumput, sumber: analisa penulis*



*Gambar 1.4* Konseptualisasi Keterkaitan Wajah Partai di Pusat dan Jabatan Publik, sumber : analisa penulis



*Gambar 1.5* Konseptualisasi Keterkaitan Wajah Partai di Akar Rumput dan Jabatan Publik, sumber: analisa penulis

Ketiga wajah partai saling berkaitan dan memengaruhi satu dengan yang lain. Wajah partai di pusat memengaruhi wajah di akar rumput dan jabatan publik, karena pengelolaan organisasi merupakan dasar partai melaksanakan tugas serta fungsinya. Wajah di akar rumput menggambarkan hubungan partai dengan pemilih, yakni dimensi elektoral. Sedangkan wajah di jabatan publik menunjuk pada hubungan partai dengan pemerintah. Wajah partai pusat, elektoral, dan pemerintah berkaitan dengan upaya partai politik mempersiapkan kader-kadernya untuk

memenangkan pemilu dan mengisi jabatan di pemerintah, tanpa mengabaikan pengelolaan organisasi, dengan melakukan kaderisasi untuk melahirkan kader-kader handal yang memiliki loyalitas dan memahami ideologi partai, agar menjalankan tugasnya sesuai dengan visi-misi dan tidak bertentangan dengan ideologi partai.

Partai politik memiliki pilihan untuk mengambil langkah strategis guna mempertahankan keberlangsungan organisasinya. Strategi partai dapat terus berubah tergantung pada tuntutan situasi politik dan kondisi sosial masyarakat. Di situasi teknologi dan informasi yang berkembang pesat seperti sekarang, partai didorong untuk beradaptasi dengan masyarakat yang semakin melek politik. Partai politik menghadapi tiga tantangan, yakni (1) perkembangan dan perubahan industri media, (2) perubahan sikap politik, partisipasi politik, dan hasil pemilu, (3) kemampuan membingkai isu-isu dalam berita dan opini publik.<sup>11</sup> Dalam upaya penyesuaian dengan kondisi yang ada, tidak menutup kemungkinan partai akan mengambil kebijakan atau strategi baru demi memenuhi kepentingannya. Tidak jarang strategi yang ditempuh partai tidak cukup membantu partai menyelesaikan problema yang tengah dihadapi. Tetapi, sebagai organisasi di lingkungan politik yang bersifat dinamis, perubahan strategi menjadi hal biasa dalam perjalanan politik sebuah partai.

Narasi dalam buku ini memaparkan pilihan politik PKS dan Partai Demokrat berdasarkan perubahan strategi yang ditempuh partai sejak didirikan. Dalam pengorganisasian partai

---

11 Sernetko, Holli A. 2014. *Partai di Abad Media*. dalam Richard S. Katz dan William Crotty (ed.), *Handbook Partai Politik*. Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm 860.

politik, inovasi dan perubahan terus dilakukan, sebab partai bisa terjebak pada kondisi yang dilematis atas pilihan politiknya. Pembahasan dalam buku ini ingin menunjukkan adanya harga yang harus dibayar oleh masing-masing partai jika tidak mampu memenuhi konsekuensi dari pilihan politiknya. Tulisan ini juga ingin menunjukkan bahwa problema partai yang dilematis tidak hanya dihadapi oleh partai ideologis seperti PKS, melainkan partai dengan corak berbeda seperti Partai Demokrat.

Keterkaitan dilema dan pilihan partai politik pada studi ini ditunjukkan menggunakan kacamata tiga wajah partai yang ketiganya dikonseptualisasi saling terkait dan tidak dapat dipenuhi secara terpisah-pisah. Melalui analisis kondisi di setiap kaitan antarwajah partai, kasus yang dihadapi PKS dan Partai Demokrat menjelaskan bahwa problema yang dihadapi partai merupakan konsekuensi dari ketidakmampuan partai memenuhi kaitan-kaitan pada tiga wajah partai.

# BAB II

## Problema Pengorganisasian Partai Politik

**D**emokrasi memberikan ruang bagi partai politik terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan melalui pemilu. Tanpa partai, tidak ada pemilu dan persaingan untuk perwakilan, yang mana adalah kunci dari demokrasi.<sup>12</sup> Sartori mengungkapkan bahwa partai politik merupakan setiap kelompok kepentingan yang hadir melalui pemilihan umum dan menempatkan perwakilannya di jabatan publik melalui pemilu,<sup>13</sup> sehingga hubungan antara pemilu dan partai politik tidak dapat dilepaskan.

Keterkaitan pemilu dan partai politik diikuti dengan persaingan partai. Setiap partai dituntut mengembangkan manuver dan strategi politik, di antaranya strategi kampanye, strategi

---

12 Wiegand, Krista E. 2016. *Bombs and Ballots: Governance by Islamist Terrorist and Guerilla Groups*. New York: Routledge, hlm. 23

13 *Ibid.*

kaderisasi, dan strategi pendidikan politik. Persaingan politik yang sehat, terbuka, dan transparan menjadikan partai dapat saling mengevaluasi, memotivasi, dan menjalin interaksi yang dinamis dengan masyarakat.<sup>14</sup> Sedangkan peserta pemilu, pengurus, dan simpatisan partai dapat saling mengevaluasi, apakah strategi politik yang dilakukan sudah tepat atau belum. Ditambah hubungan aksi reaksi antarpolitical politik, membuat partai politik terus memperhatikan strategi dan manuver politik yang dilakukan partai lain.<sup>15</sup> Kata lainnya, antarpolitical politik saling mengamati, saling menilai, dan saling mengevaluasi. Misal ketika partai lain melakukan manuver politik yang dapat mengancam elektabilitas suatu partai, maka partai tersebut dapat menentukan strategi baru.

Janda mengungkapkan, bahwa variasi dalam organisasi partai memiliki efek penting terhadap kinerja partai, diukur menurut keberhasilan pemilu, jangkauan aktivitas, dan keeratan legislatif.<sup>16</sup> Keragaman organisasi mengacu pada strategi politik yang berpengaruh dalam kinerja partai. Selain strategi kampanye, kemenangan partai dalam pemilu juga didukung dengan kemampuan partai mengelola organisasinya, khususnya dalam pelaksanaan fungsi partai, di antaranya sebagai mediasi antara pemerintah dan rakyat, pencalonan kandidat, mengorganisasi

---

14 Firmanzah.2010.*Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik Pembelajaran Pemilu 2009*.Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.,hlm. xxxi

15 *Ibid.*,hlm.xxxiii

16 Janda, Kenneth.1983.*Cross National Measures of Party Organizations and Organizational Theori*.dalam *European Journal of Political Research*, pg 319-332.Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., hlm 330.

pemerintahan, mendorong akuntabilitas publik, pendidikan politik, dan pengatur konflik.<sup>17</sup>

Permasalahan-permasalahan dalam tubuh partai politik saat ini bukanlah sebuah hal baru, sebab permasalahan muncul seiring dengan pilihan organisasi itu sendiri, eksternal ataupun internal. Faktor eksternal di antaranya disebabkan oleh situasi sosial politik, sistem politik, kebijakan pemerintah, ataupun sistem pemerintahan. Sedangkan faktor internal berkaitan dengan kemampuan pengorganisasian partai, yakni kemampuan melaksanakan kaderisasi, regenerasi kepemimpinan, seleksi kandidat, kampanye, dan sosialisasi politik. Bagaimana kemudian partai mengelola permasalahan yang dihadapi, menjadi salah satu faktor penentu eksistensi dari partai politik.

Problema yang disebabkan faktor eksternal dan internal sama-sama harus diselesaikan. Apabila partai tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, dapat berakibat pada keberlangsungan partai. Mengenai problema karena faktor eksternal misalnya, ketika pemerintah memutuskan *electoral threshold*, yakni menentukan ambang batas bagi keikutsertaan partai dalam pemilu, maka partai kecil dengan dukungan di bawah ambang batas harus mencari strategi baru, salah satunya yaitu berkoalisi dengan partai lain. Sedangkan problema partai faktor internal adalah kemampuan partai melakukan kaderisasi. Partai politik sebagai organisasi memerlukan kemampuan membangun dan melaksanakan manajemen sumber daya manusia. Dalam proses kaderisasi, para kader menerima pengetahuan mengenai

---

17 Budiardjo, Miriam.2003.*Dasar Dasar Ilmu Politik*.Jakarta:Gramedia, hlm.163-164

visi, misi, ideologi, dan posisi partai di pemerintah supaya sejalan dengan visi partai dan kompeten dalam menjalankan tugasnya.

### **A. Permasalahan Kepartaian di Indonesia**

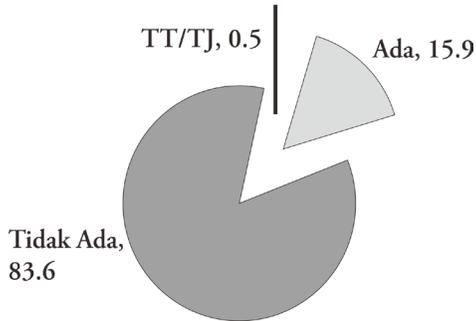
Era reformasi memberikan keterbukaan dan kebebasan bagi publik untuk berpendapat dan mengkritik partai politik. Dampak dari keterbukaan dan kebebasan tersebut adalah dengan munculnya sentimen negatif terhadap partai dan politisi partai. Puncaknya ketika kasus korupsi yang menjerat para politisi muncul silih berganti.<sup>18</sup> Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai pun rendah. Berdasarkan survey LSI terkait *party ID*, yakni kondisi dimana pemilih merasa partai tertentu merupakan identitas politiknya, menghasilkan 83,6% pemilih tidak memiliki perasaan kedekatan terhadap partai politik yang ada.<sup>19</sup> Padahal perasaan kedekatan terhadap partai merupakan aspek psikologis dalam hubungan partai dan pemilih. Rendahnya perasaan kedekatan terhadap partai politik menunjukkan kalau partai belum mampu untuk benar-benar hadir sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Tidak sedikit pula publik yang beranggapan bahwa partai politik merupakan kendaraan bagi kelompok elite untuk mencapai kepentingan pribadi. Data hasil Survey LSI terkait fungsi partai politik sebagai saluran aspirasi rakyat dinilai negatif.<sup>20</sup>

---

18 Sebastian, Leonard C.2012.*Special Focus Political Parties and Democracy in Indonesia*,dalam Jurnal South East Asia Research,20,4,pp 463-471., hlm 464.

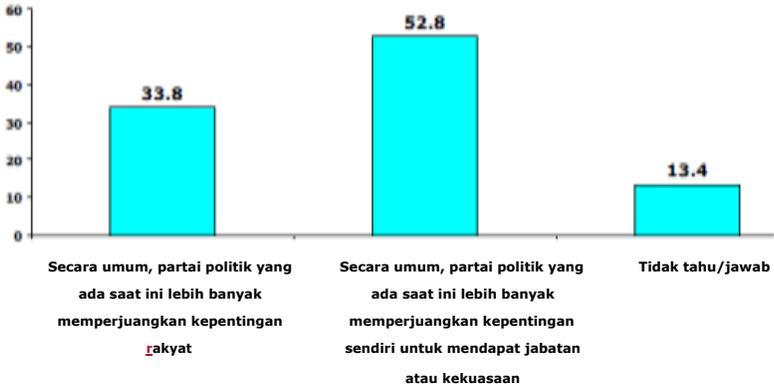
19 Lembaga SurveySurvei Indonesia.2015.*Partai Politik di Mata Publik "Evaluasi atas Kinerja Partai dan Regenerasi Politik*.Jakarta:Rilis Surnas LSI., hlm.25.

20 Ibid., hlm.37.



Gambar 2.1 Dimensi afeksi : Party ID pemilih terhadap partai politik, sumber : Survey LSI,2015

### Parpol sebagai Saluran Aspirasi Rakyat (%)



Gambar 2.2 Partai politik sebagai saluran aspirasi rakyat, sumber : Survey LSI 2015

Sejarah kepartaian di Indonesia telah ada sejak era sebelum kemerdekaan. Kemudian tumbuh dan berkembang di era pemerintahan Demokrasi Terpimpin, Era Orde Baru, hingga Era Reformasi. Secara historis, partai-partai politik di Indonesia sebenarnya lahir, tumbuh, dan besar bersamaan dengan

pertumbuhan identitas ke-Indonesiaan pada awal abad ke-20.<sup>21</sup> Sejarah kepartaian yang telah ada sejak sebelum kemerdekaan menempatkan partai sebagai sarana untuk melakukan pergerakan politik, konsolidasi, ataupun membuat berbagai kesepakatan.

*Pada era prakemerdekaan*, kebutuhan akan memperoleh kemerdekaan sangat kuat dan semangat perjuangan sangat kental. Karakter khas dari partai yang tumbuh di era ini adalah partai gerakan, partai massa, dan partai elit, karena merupakan metamorphosis dari organisasi pergerakan yang sebelumnya tidak menekankan gerakan politik.<sup>22</sup> Partai didirikan untuk memperkuat perjuangan kemerdekaan dengan menjadi sarana aspirasi dan membangun persatuan. Sebagian besar pendiri bangsa, seperti HOS Tjokroaminoto, Tjipto Mangunkusumo, Sukarno, dan Hatta adalah pendiri sekaligus pemimpin partai pada zamannya.<sup>23</sup> Tokoh-tokoh tersebut memiliki peran besar dalam pertumbuhan partai politik. Pergerakan politik diawali dengan didirikannya organisasi Budi Utomo tahun 1908, kemudian diikuti dengan pendirian Sarekat Islam (1912), Indische Partij (1912), Muhammadiyah (1912), serta organisasi kedaerahan dan kepemudaan seperti Sarekat Celebes dan Jong Java.<sup>24</sup>

*Indische partij* menjadi partai pertama di era prakemerdekaan. Partai Syarikat Islam, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Partai Nasional Indonesia (PNI) lahir dalam waktu berdekatan. PSI

---

21 Haris, Syamsudin.2014.*Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*. Jakarta:Yayasan Pustaka Obor, hlm 68

22 Pamungkas, Sigit.*Op.cit.*,hlm 147.

23 Haris, Syamasudin.,*Op.cit.*, hlm 21.

24 Iin Nur Insaniwati.2002. *Mohamad Roem: Karier Politik dan Perjuangannya, 1924-1968*,Magelang: Yayasan Indonesiatera hlm 13-14.

dan PKI berdiri pada tahun 1920 , kemudian PNI berdiri pada tahun 1927. Saat itu, tekanan dari kelompok penguasa menjadi hambatan bagi pertumbuhan partai, padahal semangat akan perjuangan sangat kuat dan partai murni sebagai alat perlawanan. Namun meski tekanan kolonial terhadap gerakan politik sangat kuat, kelahiran gerakan politik tidak berhenti.

PKI dan PNI merupakan dua partai besar pascakemerdekaan dan menjadi peserta pemilu tahun 1955. Tetapi sebenarnya kedua partai tersebut telah lahir, berkembang, dan pernah dibubarkan di era prakemerdekaan. PKI lahir pada tahun 1920 dan dibubarkan pada tahun 1928 karena melakukan pemberontakan.<sup>25</sup> Selanjutnya PNI didirikan oleh Sukarno pada 1927. Namun karena dianggap radikal, Sukarno kemudian diasingkan oleh pemerintah Belanda, dan PNI dibubarkan pada tahun 1931. Tekanan dan pembubaran organisasi politik dialami juga oleh partai-partai yang berdiri di masa itu.

*Di era awal kemerdekaan*, Indonesia masih dalam fase mencari sistem politik yang tepat. Sukarno memenangkan perdebatan tentang sistem kepartaian dan diputuskan PNI sebagai partai tunggal. Tetapi kebijakan partai tunggal dibatalkan setelah 9 hari diputuskan, dengan dikeluarkannya maklumat Pemerintah oleh Hatta sebagai wakil presiden. Maklumat Pemerintah 3 November 1945 berisi anjuran pembentukan partai dan harus digantikan oleh suatu sistem kepartaian multipartai di bawah sistem pemerintahan parlementer.<sup>26</sup> Sistem kepartaian multipartai

---

25 Pamungkas, Sigit. *Op.cit.*, hlm 149.

26 Haris, Syamsudin. 2006. *Demokratisasi Partai dan Dilema Sistem Kepartaian di Indonesia*. makalah dalam Seminar Nasional “Mencari Format Baru Pemilu dalam

yang ditetapkan mendorong lahirnya partai-partai baru. Perannya semakin didukung dengan penerapan sistem parlementer yang memberikan kesempatan bagi pertumbuhan dan perkembangan partai politik.

Sistem parlementer memberikan peran dominan kepada partai politik karena kedudukan parlemen di pemerintah lebih tinggi dari bagian lain dalam pemerintahan. Kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri yang membawahi kabinet, dan presiden berperan sebagai kepala negara. Kekuasaan negara terpusat kepada parlemen, dengan memberikan mosi tidak percaya pada pemerintah, yang klimaksnya bisa menggulingkan pemerintahan saat itu. Sejak sistem parlementer diterapkan pada tahun 1945 hingga tahun 1947, tercatat tiga kali perubahan kabinet, yakni kabinet Syahrir I, II, dan III.<sup>27</sup> Partai berperan dominan dalam pemerintahan karena parlemen diisi oleh perwakilan-perwakilan dari partai politik dan anggota parlemen dapat menjabat juga sebagai anggota kabinet. Problema partai di era ini dipengaruhi dengan sistem politik yang berubah-ubah dan pelembagaan sistem kepartaian multipartai yang masih rendah.

*Pada Era Demokrasi Terpimpin*, di bawah kepemimpinan Sukarno, pemerintah melumpuhkan partai politik. Pada masa ini, pemerintah melakukan intervensi terhadap pertumbuhan partai politik. Dengan dikeluarkannya dekret presiden tahun 1959, sistem pemerintahan kembali pada sistem presidensialisme dan menunjukkan berakhirnya sistem pemerintahan oleh partai melalui parlemen. Pemerintah hanya mengakui 10 partai politik,

---

Rangka Penyempurnaan UU Bidang Politik”, hlm. 68

27 Pamungkas, Sigit., *Op.cit.*, hlm 151

yakni PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, PSII, IPKI, Partai Indonesia (Partindo), dan Perti.<sup>28</sup> PKI menjadi partai emas karena mendapat dukungan dari Sukarno dan didukung kekuatan politik rakyat berbentuk Front Nasional.

*Era Orde Baru*, pemerintahan berada di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang menjabat setelah keluarnya Supersemar. Pada era ini, intervensi terhadap partai sangat kuat. Orde baru melakukan kontrol kepartaian, struktur ide, dan gagasan partai politik.<sup>29</sup> Pemerintah memusatkan kekuasaan parlemen kepada satu partai yang tidak mau disebut sebagai partai, yakni Golkar. Partai-partai nasionalis digabungkan dengan PDI, dan partai Islam digabungkan dengan PPP, sehingga pada era itu dikenal memiliki 1 Golkar dan 2 partai politik. Pemilu-pemilu di masa orde baru hanya dijadikan mekanisme penguasa untuk mempertahankan kekuasaan dan memperbaharui legitimasi.<sup>30</sup> Golkar selalu menjadi urutan pertama sedangkan PDI dan PPP terus menerus menjadi posisi 2 dan 3 di setiap pemilu.

Partai pada masa Orde Baru tidak hanya bergelut dengan kondisi eksternal partai, yakni kondisi sosial politik Negara, melainkan memiliki polemik dalam pengorganisasiannya. Permasalahan internal dihadapi oleh partai, karena adanya kepentingan partai untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial politik atau melakukan perlawanan untuk perubahan. Sebagai contoh, pada akhir era orde baru, PDI terpecah

---

28 *Ibid.*, hlm 153

29 *Ibid.*, hlm 155

30 Yudha, Hanta. 2010. *Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema ke Kompromi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama., hlm 116.

menjadi dua kubu, yakni kubu yang diketua Suryadi sebagai kelompok pendukung pemerintahan Soeharto, dan kubu dengan ketua Megawati yang melawan pemerintahan. PDI di bawah kepemimpinan Megawati kemudian berganti nama menjadi PDI-P.

Di era reformasi, penerapan demokrasi mendukung pertumbuhan partai politik serta memperkuat peran partai untuk menjadi representasi masyarakat, dimana partai sepenuhnya berfungsi mengisi jabatan publik melalui pemilu. Pemerintah tidak melakukan intervensi seperti pembatasan hak berkumpul dan berserikat, sehingga partai politik bersaing meningkatkan ide-ide dalam menarik konstituen dan dukungan. Partai dihadapkan oleh berbagai pilihan politik dan strategi, guna meningkatkan elektabilitas.

## **B. Partai Mencari Bentuk Ideal**

Demokrasi membuka kesempatan bagi partai politik untuk mengisi jabatan di pemerintahan melalui pemilu sebagai bagian dari demokrasi prosedural. Perolehan jumlah suara menjadi penting, sehingga perebutan suara pemilih tidak dapat dihindarkan. Ironisnya, dalam menyusun strategi memperebutkan suara, partai seolah mengabaikan fungsi lainnya dari partai itu sendiri, salah satunya adalah persoalan kaderisasi. Perilaku pemilih yang umumnya melihat tokoh berdasarkan popularitas, mendorong partai bertindak pragmatis demi memenangkan pemilu. Partai lebih memilih menempatkan kandidat yang memiliki popularitas dibandingkan kandidat yang memiliki kapabilitas. Akhirnya, pelaksanaan fungsi kaderisasi kerap tidak tersistem. Fungsi kaderisasi dan seleksi kandidat untuk dicalonkan dalam

pemilihan yang menjadi bagian partai menjadi tidak berjalan dengan semestinya.

Sistem kaderisasi yang baik memang belum tentu mengantarkan partai menjadi pemenang. Tetapi sistem kaderisasi yang baik dapat meminimalisir problem yang dihadapi partai, karena kader memahami ideologi, visi-misi partai, serta arah-tujuan dari organisasi. Hal tersebut menjadikan pengorganisasian kuat dan kerekatan basis sosial lebih terjamin karena adanya pemahaman dan tujuan yang sama dalam menggerakkan organisasi. Di lapangan, kader memiliki peran penting dalam memengaruhi citra partai, baik maupun buruk, di mata pemilih.<sup>31</sup> Karena peran yang penting tersebut, kader menjadi cermin partai, sehingga penting bagi partai untuk menjalankan fungsi kaderisasi, sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat pada partai. Ini menunjukkan adanya kepentingan *eksistensi* dan kemampuan *survive*. Adapun *eksistensi* yang dimaksudkan di sini adalah ketika partai memperoleh suara mayoritas dalam pemilu legislatif dan mampu mengirimkan wakil-wakilnya dalam parlemen. Sedangkan kemampuan untuk *survive*, merujuk pada kinerja partai dalam melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai organisasi. Kemampuan partai memperoleh kursi di parlemen perlu diimbangi dengan kemampuan partai mengelola organisasinya. Ketika partai hanya mengunggulkan salah satunya, potensi partai menghadapi permasalahan semakin besar.

---

31 Program Studi S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah. *Memperkuat Parpol di Tiga Wajah*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, hlm 1.

### C. Problema Partai Beda Corak

Pada pemilu 2014, tercatat 12 partai nasional menjadi peserta pemilu yakni PDIP, Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Golkar, PKS, PPP, PKB, PAN, Partai Hanura, Partai Gerindra, PBB dan PKPI. Posisi 3 besar ditempati (1) PDIP dengan perolehan suara 18,95%; (2) Partai Golkar dengan perolehan suara 14,75%; (3) Partai Gerindra dengan perolehan suara 11,81%.<sup>32</sup> PDIP dan Golkar merupakan partai lama yang telah ada sejak orde baru dan masih mampu mempertahankan eksistensinya dan mampu *survive* di tengah persaingan dan perkembangan sistem politik yang ada.

PDIP berada di bawah pimpinan garis keturunan Sukarno, yakni Megawati Soekarno Putri. Dalam studinya, Mietzner menekankan bahwa keluarga Sukarno merepresentasikan cita-cita gerakan melalui: orientasi nasionalis; komitmen pluralisme; populisme ekonomi, dan kepastian kelangsungan nilai, norma, dan keyakinan terkait dengan nama Sukarno.<sup>33</sup> Hal tersebut ditafsirkan dengan kepemimpinan Megawati yang belum berganti sejak partai berdiri. Partai lama yang juga masih mampu mempertahankan eksistensi dan *survive* di perpolitikan adalah Partai Golkar. Meski kemudian di tahun 2014, partai mengalami perpecahan dengan dualism kepemimpinan.

---

32 SK KPU Nomor 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 yang Memenuhi Ambang Batas dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Secara Nasional dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014.

33 Sebastian, Leonard C. *Op.cit.*, hlm 467.

Selain dua partai lama yang disinggung sebelumnya, PKS dan Partai Demokrat memiliki sejarah yang menarik sejak didirikan. Keduanya berhasil mengambil perhatian konstituen sejak mengikuti pemilu 2004. PKS dan Partai Demokrat memiliki corak kepartaian yang berbeda, bahkan cenderung berbanding terbalik. PKS merupakan partai dengan ideologi Islam, sedangkan Partai Demokrat dengan ideologi Nasionalisme Religius dan mengampanyekan diri sebagai partai jalan tengah. PKS dengan ideologinya dan pengorganisasian yang ter sistem membuat partai memiliki kelebihan organisasi yang kokoh dan pendukung yang militan. Sedangkan Partai Demokrat memilih menjadi partai pragmatis dengan menjual personalistik tokohnya dibanding membangun organisasinya. Tetapi, Partai Demokrat dalam waktu singkat mampu mengungguli partai lainnya karena kemampuannya mengelola popularitas dengan menjadi partai pemenang pada pemilu 2009.

PKS mampu mengungguli partai Islam lainnya yang sudah ada lebih dulu. Tidak dapat dipungkiri, bahwa performa partai Islam kian menurun. Pada pemilu 2014 tersisa 4 partai politik Islam yang berhasil memperoleh kursi di legislatif, yakni PKS, PAN, PKB dan PPP. Berikut adalah tabel perbandingan persentase perolehan suara PKS dengan partai Islam yang mampu *survive* hingga pemilu 2014.

Persentase Perolehan Suara Partai Islam  
pada Pemilu 2004-2014

No	Partai Islam	Pemilu			
		1999	2004	2009	2014
1	PKS	(masih sebagai PK) 1,36%	7,34%	7,89%	6,79%
2	PKB	12,61%	10,57%	4,94%	9,04%
3	PAN	7,12%	6,44%	6,01%	7,57%
4	PPP	10,71%	8,15%	5,32%	6,53%

*Tabel 1 sumber: diolah dari KPU dan berbagai sumber*

PKS resmi mengikuti pemilu pada tahun 2004 dan berhasil menarik suara yang cukup signifikan dengan mengungguli PAN, diikuti oleh penurunan perolehan suara PKB, PAN, dan PPP. Kemudian, pada pemilu 2009 PKS berhasil unggul diantara partai Islam lainnya, meskipun hanya mengalami kenaikan suara sebesar 0,55%. Tetapi, suara partai Islam lainnya mengalami penurunan cukup drastis, sebagai contoh adalah PKB pada pemilu 1999 memperoleh 12,61% mengalami penurunan menjadi 10,57% pada pemilu 2004, kemudian turun secara drastis pada pemilu 2009 menjadi 4,95%.

PKS mampu mengungguli partai Islam lain dengan kesamaan memiliki basis pendukung tradisional, tetapi PKS belum mampu mengungguli partai sekuler dalam hal politik kursi. Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan bahwa hubungan antara partai Islam bersifat *zero-sumgame*, dimana terjadi kanibalisasi antarpartai Islam yang ditunjukkan dengan suara PKS melonjak pada pemilu

2004 dan penurunan suara partai Islam lain.<sup>34</sup> Pemilih PKS diindikasikan merupakan pemilih dari partai Islam lainnya, sehingga pemilih hanya saling berpindah preferensi diantara partai Islam.

PKS sebagai salah satu partai dengan ideologi Islam menyadari perlunya memperluas basis dukungan di luar pemilih tradisional. Pemilih tradisional yakni pendukung militan yang loyal terhadap partai dan memiliki kemungkinan kecil untuk menggeser preferensi pilihannya kepada partai lain. Namun, ideologi partai membatasi pergerakan partai untuk menarik seluruh kalangan di tengah masyarakat yang plural.

Menjelang pemilu 2004, PKS memutuskan pilihan taktis dengan menawarkan isu-isu universal kepada publik, seperti partai anti korupsi. PKS juga melakukan strategi politik dengan mendeklarasikan diri sebagai partai terbuka dalam usaha menarik pemilih yang lebih banyak.<sup>35</sup> Hal tersebut menunjukkan PKS semakin bergeser ke logika elektoral daripada bergerak sebagai partai ideologis. Tanuwidjaja memperingatkan bahwa strategi moderasi PKS mungkin menjadi pedang bermata dua, terbukti hanya cukup sukses dalam menarik pemilih median sementara mengasingkan konstituen Islamnya.<sup>36</sup> Pilihan PKS menjadi partai terbuka dapat memunculkan keraguan dari pemilih setia karena partai yang idealnya menjadi preferensi bagi pemilih Islam, tetapi mengumumkan diri sebagai partai semua kalangan. Hal tersebut

---

34 Muhtadi, Burhanuddin. 2012. *Dilema PKS: Suara dan Syariah*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, hlm. 205.

35 Muhtadi, Burhanuddin. *Op.cit.*, hlm 262.

36 Sebastian, Leonard C. *Op.cit.*, hlm 466.

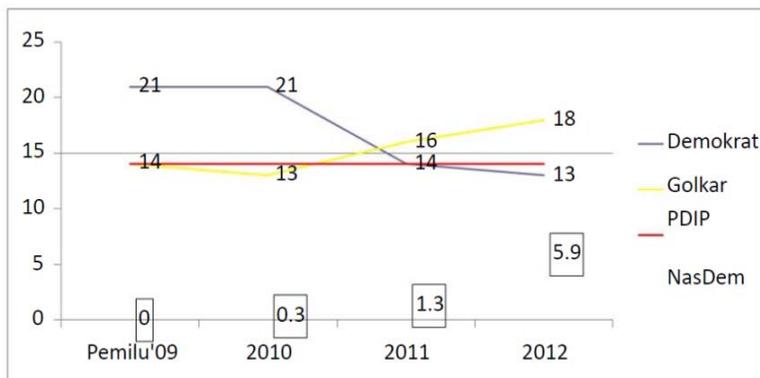
dapat menurunkan kepercayaan konstituen terhadap jati diri partai dan upaya mencapai cita-cita ideologis.

Partai Demokrat merupakan partai yang didirikan pada tahun 2002 dan memilih ideologi Nasionalis Religius. Ideologi tersebut dinilai kabur dan menunjukkan pola dasar sebagai partai *catch all*, yakni mengutamakan meraup suara dan diperkuat dengan partai memiliki ideologi tengah yang tidak dominan pada salah satu aliran. Kekuatan Demokrat terletak pada kepemimpinan SBY. Partai Demokrat menjadi partai penguasa parlemen dalam waktu yang terhitung singkat. Pada awal kelahirannya, popularitas partai meningkat seiring dengan peningkatan popularitas SBY. Keberhasilan partai mengantarkan SBY menjadi presiden pada pemilu 2004 dimanfaatkan dengan baik oleh partai hingga mampu menjadi partai pemenang pada pemilu 2009 dan SBY kembali terpilih menjadi presiden. Kemampuan partai Demokrat memanfaatkan dan mengelola popularitas menjadi prestasi bagi partai tersebut. Partai mampu membangun hubungan dengan pemilih hingga mampu menempatkan perwakilan-perwakilannya di jabatan publik dan menguasai parlemen sepanjang 2009-2014.

Di sisi lain kemampuan partai memanfaatkan popularitas tokoh, partai harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya dengan memiliki organisasi yang rapuh. Hal tersebut ditunjukkan dengan kader-kader partai yang tertangkap melakukan tindak pidana korupsi. Nazarudin pada saat menjabat sebagai bendahara partai Demokrat ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi wisma atlet Hambalang, Andi Malarangeng yang tengah menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga mengundurkan diri sebelum ditetapkan sebagai tersangka, dan situasi terparah adalah ketika ketua umum yang menjabat saat itu, yakni Anas

Urbaningrum turut terjerat kasus korupsi. Hal tersebut dipercaya turut menjadi faktor menurunnya elektabilitas partai. Selain itu, kinerja elit partai di tingkat nasional yang buruk dan sangat massif disorot media sangat berpengaruh melemahkan ikatan pemilih dengan partai politik.

### Trend Dukungan Partai Tahun 2009 - 2012

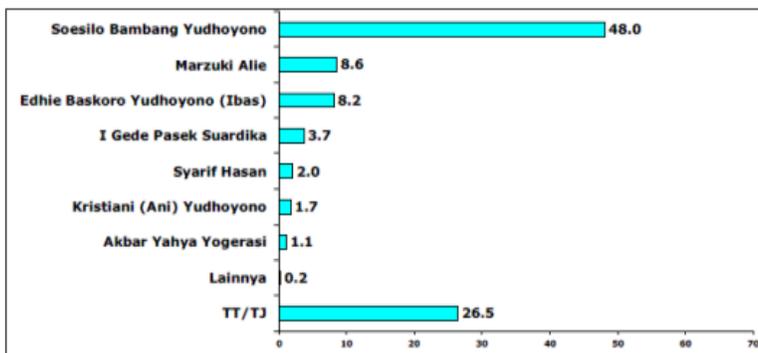


*Gambar 2.3 Trend Dukungan Partai, sumber: Survey LSI 2012 “Media Massa dan Sentimen Terhadap Partai Menjelang Pemilu 2014”.*

Bagan di atas menunjukkan penurunan dukungan pemilih terhadap partai Demokrat sejak tahun 2010 hingga menjelang pemilu 2014. Dukungan terhadap partai terhitung berjumlah tetap sampai setahun setelah pemilu 2009, tetapi mulai mengalami penurunan sejak tahun 2010. Kondisi tersebut terjadi ketika partai mulai goyah karena para kadernya di pusat diterpa isu-isu korupsi.

Partai Demokrat yang kekuatannya ada pada popularitas, ketika citra partai tercoreng, maka imbasnya lebih terasa.

Kemerosotan suara pada pemilu 2014 menunjukkan imbas besar dari penurunan citra partai dan lemahnya organisasi. Tetapi, meskipun elektabilitas partai mengalami penurunan, menurut survei LSI tahun 2015, SBY masih diunggulkan sebagai ketua umum Partai Demokrat untuk 5 tahun ke depan.



*Gambar 2.4 Ketua Umum Partai Demokrat Dukungan Rakyat, sumber: Survei LSI “Partai Politik di Mata Publik”, 2015*

Hal tersebut menunjukkan kemerosotan elektabilitas partai Demokrat tidak diikuti dengan penurunan kepercayaan terhadap tokohnya, yakni SBY. Partai belum mampu mengunci dan memiliki kepercayaan masyarakat sepenuhnya, karena kepercayaan masih terbatas pada personalistik SBY. Partai Demokrat memiliki tantangan untuk memperkuat organisasinya agar tidak mudah jatuh meskipun diterpa permasalahan yang mengancam citra partai. Oleh karena itu, partai dituntut untuk memenuhi fungsi-fungsi sebagai partai, bukan hanya mengandalkan kekuatan personalistik dari tokohnya.

Perubahan dan langkah-langkah strategis yang terus dicoba dan dilaksanakan oleh PKS dan Partai Demokrat menunjukkan bahwa partai berusaha menutupi kekurangan yang dimiliki untuk

mampu bertahan di tengah persaingan elektoral yang terbuka. PKS sebagai partai ideologis mulai mengarah pada orientasi kompetisi elektoral. Demi mencapai kepentingannya, PKS memiliki kebutuhan untuk memperluas basis massa sehingga memilih langkah pragmatis menjadi partai terbuka. Sedangkan Partai Demokrat berlindung di balik popularitas tokohnya, yakni SBY. Partai Demokrat sejak awal menjadi partai pragmatis dan tidak menjadikan ideologi sebagai perekat kader pendukung sehingga berpotensi terjadi tumpang tindih kepentingan personal di internal partai. Selain itu partai masih menyandarkan diri sepenuhnya kepada popularitas tokohnya, yang mana menjadi perekat bagi seluruh elemen partai.



# BAB III

## Pilihan Politik PKS dan Partai Demokrat

### A. PKS: Pragmatism Partai Ideologis

**P**KS mengawali langkah politiknya dengan menjadi sebuah organisasi dakwah di lingkungan kampus. Kemudian ia bertransformasi menjadi organisasi politik dan menempatkan dirinya sebagai Partai Islam. PKS memiliki karakter militan dan memiliki nilai ideologi Islam yang ditanamkan pada setiap kadernya. Di awal pendiriannya, partai terlahir dengan nama Partai Keadilan (PK), dimana murni menjadi representasi Jamaah Tarbiyah.

Pada pemilu pertamanya di tahun 1999, perolehan suara PK tidak mencapai *electoral threshold*. Di tahun 2002, PK bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan ideologi dan organisasi yang sama, tetapi membawa strategi baru dengan menawarkan isu yang lebih universal kepada pemilih. Pilihan menggunakan strategi pencitraan yang mengedepankan isu-isu universal memengaruhi strategi kampanye PKS menjadi

lebih terbuka.<sup>37</sup> Namun pilihan untuk tetap menjadi partai ideologis membawa PKS pada dilema ketika partai berkompetisi dalam pemilu. Burhanuddin Muhtadi dalam hasil tesisnya “Dilema PKS : Suara dan Syariah” mengatakan bahwa PKS saat ini sedang mendayung di dua karang, di mana memilih strategi partai sebagai representasi basis sosial atau logika kompetisi elektoral.<sup>38</sup>

Partai sebagai kendaraan politik bersaing untuk memperoleh kekuasaan dengan perolehan suara di pemilu. PKS memiliki pengalaman bahwa menjual ideologi saja tidak cukup untuk memenuhi kepentingan mengisi posisi jabatan publik melalui pemilu. PKS berdiri secara resmi pada tahun 2002, dengan ideologi yang sama seperti ketika masih bernama PK, dengan menjalankan strategi membawa isu-isu lebih universal, seperti partai bersih, anti korupsi, dan anti terorisme. Strategi tersebut berhasil membawa partai pada perolehan suara yang cukup signifikan pada pemilu 2004, hingga dijuluki *the raising star*. Saat itu, ideologi yang dianggap membatasi perluasan basis massa dipatahkan dengan strategi partai menjual isu-isu universal yang tidak terbatas pada isu-isu agama dan ideologis. Pada pemilu 2009, PKS kembali mengampanyekan diri sebagai partai terbuka. Tetapi, perolehan suara PKS cenderung stagnan. Pada pemilu 2004 total perolehan suara PKS 7,34% dan pada pemilu 2009 total perolehan suara 7,89%. Walaupun ada perluasan basis massa dibandingkan dengan sebelum partai mengampanyekan diri

---

37 Kamil, Faisal Arief.2013.*Kegagalan Perluasan Basis Politik Partai Keadilan Sejahtera melalui Iklan Politik*.Skripsi.Universitas Gadjah Mada., hlm 46.

38 Muhtadi, Burhanuddin.,*Op.cit.*, hlm. 222

sebagai terbuka, tetapi masih sulit bagi PKS menjadi pemenang pemilu.<sup>39</sup>

### A.1. PKS Sang Partai Dakwah

PKS merupakan salah satu partai di Indonesia yang berideologi Islam Religius. PKS merupakan transformasi dari Partai Keadilan (PK) yang resmi berdiri pada 20 Juli 1998. Berbeda dengan partai politik Islam seperti PKB dan PAN, dimana PKB mewarisi NU, dan PAN mewarisi Muhammadiyah, PKS berasal dari sebuah gerakan Tarbiyah. Kata “tarbiyah” diambil dari bahasa Arab untuk “proses pendidikan, pelatihan, dan pelayanan”.<sup>40</sup> Cikal bakal Partai Keadilan, yaitu gerakan dakwah kampus yang dalam perkembangannya disebut sebagai Jamaah Tarbiyah mulai berkembang sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto. Adapun penyebutan Jamaah Tarbiyah digunakan sebagai mekanisme untuk membedakan diri dengan kelompok Islam lainnya, seperti NU ataupun Muhammadiyah.<sup>41</sup>

Partai Keadilan dibentuk atas inisiatif dari para aktivis gerakan dakwah Jamaah Tarbiyah berdasarkan hasil survei dan *polling*. Para aktivis menyebarkan 6000 kuesioner kepada kader-kader inti gerakan dakwah. Dari 5800 kuesioner yang dikirim kembali, menghasilkan 65% responden ingin mendirikan partai dan 27% ingin membentuk ormas.<sup>42</sup> Dikarenakan jumlah kader yang mendukung pembentukan partai politik lebih besar, akhirnya

---

39 *Ibid.*,

40 Muhtadi, Burhanudin.Op.cit.,hlm. 42

41 *Ibid.*, hlm 41-42

42 Rahmat, Imdadun M. 2008.*Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*.Yogyakarta: PT LKis Pelangi Aksara Yogyakarta, hlm.237.

didirikanlah Partai Keadilan. Ketika partai berdiri, semua anggota Tarbiyah secara otomatis menjadi anggota Partai Keadilan. Kemudian secara sistemik partai mengambil alih manajemen penyelenggaraan forum diskusi keagamaan dan pelatihan kader.<sup>43</sup>

Tahun 1999 menjadi pemilu pertama yang diikuti PK. Tetapi performa Partai Keadilan di pemilu pertamanya gagal menarik minat pemilih untuk memberikan suaranya kepada partai. Dengan hanya mengantongi 2% suara, partai gagal melewati *electoral threshold*. Para kader mencari cara agar partai dapat tetap bertahan dan bisa mengikuti pemilu selanjutnya. Akhirnya diputuskan melakukan transformasi dari Partai Keadilan menjadi Partai Keadilan Sejahtera. PKS resmi berdiri pada 20 April 2002. Tidak ada perbedaan dalam struktur organisasi dan basis dukungan. Perbedaan yang dilakukan adalah pembaharuan strategi dalam pergerakannya dengan mengangkat isu-isu yang universal, seperti isu anti korupsi dan dukungan kepada saudara-saudara di Palestina. Meski menempuh strategi kampanye yang lebih cair, PKS berusaha tetap mempertahankan status sebagai partai ideologis.

Sejarah panjang PKS yang diinisiasi dari sebuah gerakan dakwah membuat masyarakat kerap menjulukinya sebagai partai dakwah. Kekhasan PKS sebagai partai dakwah secara substansi ditunjukkan melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai. Pada awal partai terbentuk, PKS memiliki tujuan mewujudkan cita-cita nasional sesuai dengan Pembukaan UUD RI 1945 dan mewujudkan masyarakat madani yang adil

---

43 Muhtadi, Burhanudin, Op.cit., hlm 124

dan sejahtera yang diridhai *Allah subhanahu wa ta'ala*.<sup>44</sup> Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, dipaparkan dalam Anggaran Dasar PKS, bahwa partai melaksanakan kegiatan politik, dakwah, pendidikan, ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan memberikan solusi untuk berbagai persoalan bangsa dan negara. Pemaknaan penerapan syrai'at Islam dalam konteks masyarakat madani adalah pembuatan hukum formal yang menyerap nilai-nilai Islam dan mengubah hukum yang bertentangan dengan nilai universal.<sup>45</sup> PKS sebagai partai ideologis menghendaki terciptanya masyarakat yang memiliki aturan hukum formal yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Dalam struktur organisasinya, sejak masih bernama PK dan kini menjadi PKS, partai memiliki Majelis Syura sebagai lembaga tertinggi, yang berwenang untuk menentukan seluruh keputusan strategis di tubuh partai.<sup>46</sup> Majelis Syura berfungsi sebagai Majelis Permusyawaratan Partai, dipimpin oleh seorang dengan anggota tetap dan tidak tetap. Dalam AD/ART PKS disebutkan bahwa Majelis Syura memiliki tugas, di antaranya<sup>47</sup>: (1) memilih dan menetapkan Ketua Majelis Syura dan Ketua Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, (2) menetapkan falsafah dasar, kebijakan dasar, platform kebijakan pembangunan partai dan rencana strategis partai, (3) menetapkan program kerja tahunan serta rancangan pendapatan dan belanja partai, (4) mengevaluasi

---

44 PKS.2005.*Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera tahun 2005*

45 Rahmat, Imdadun.M.*Op.cit.*,hlm.116.

46 Muhtadi, Burhanudin,Op.cit.,hlm 124

47 PKS.2015.*Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahteran tahun 2015*, hlm.5.

kinerja Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, (5) menyampaikan laporan perkembangan. Selain fungsi yang telah disebutkan, Majelis Syura juga memiliki wewenang dalam pemilihan, pengangkatan, dan pengunduran diri pengurus partai. Keberadaan Majelis Syura menunjukkan bahwa struktur organisasi PKS tidak berubah meskipun merupakan transformasi dari Partai Keadilan. Posisi Majelis Syura yang memegang peran sentral dalam pengorganisasian partai juga menunjukkan keseriusan partai dalam membangun organisasi dengan memiliki badan yang terlembaga dan bertanggung jawab dalam pengembangan partai.

Selain Masjid Syura, PKS yang mencitrakan dirinya sebagai partai ideologis juga menjadikan kader sebagai lokus utama pengorganisasiannya, dengan memiliki model kaderisasi berjenjang/hierarkis. Mengingat partai ini merupakan turunan dari sebuah organisasi, partai mengadopsi dan mengembangkan sistem kaderisasi yang digunakan oleh organisasi dakwah. Hal tersebut memberikan keuntungan bagi PKS, bahwa melalui kaderisasi yang berjenjang PKS memiliki kader yang militan dan memahami ideologi partainya.

## **A.2. Misi Militansi PKS**

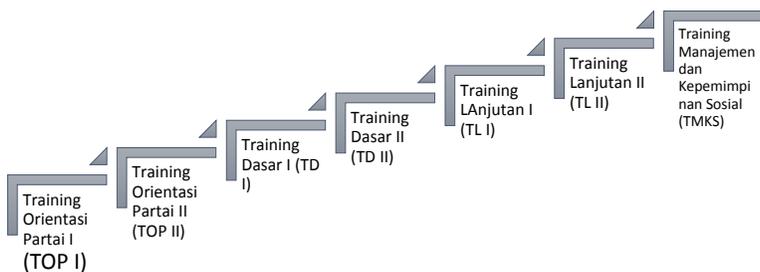
Imdadun Rahmat mengatakan bahwa PKS sebagai partai berbasis kader, memiliki sistem kaderisasi partai yang sistematis dan metodik.<sup>48</sup> Hal tersebut menunjukkan keseriusan PKS dalam membangun sumber daya manusia partai. PKS membangun militansi anggota melalui pembinaan yang dilaksanakan dalam

---

48 Rahmat, Imdadun M. *Op.cit.*, hlm.237

proses kaderisasi. Proses pengkaderan di PKS terdiri dari tiga jenis, yakni pengkaderan oleh Jamaah Tarbiyah, pengkaderan oleh *underbow* PKS, dan pengkaderan formal partai. Tarbiyah merupakan pembinaan berbasis kelompok kecil (*usroh/halaqoh*) yang dilakukan di bawah bimbingan seorang *murabbi*. Pengkaderan *underbow* PKS dilaksanakan oleh organisasi sayap dari partai, di antaranya, yang terbesar adalah organisasi KAMMI yang menjangring aktivis-aktivis pemuda Islam di universitas. Ketiga, pengkaderan formal yang dilakukan oleh pengurus partai terdiri dari tujuh jenjang, yakni: Training Orientasi Partai Satu (TOP I), TOP II; Training Dasar Satu (TD I); TD II; Training Lanjutan satu I (TL I), TL II, dan Training manajemen dan Kepemimpinan Sosial (TMKS). Pengkaderan formal ini merupakan sarana pembinaan kader sekaligus penjenjangan bagi mereka yang akan berimplikasi pada distribusi peran dan posisi struktural di PKS.<sup>49</sup>

Berikut adalah tujuh jenjang kaderisasi formal PKS:



Gambar 3. 1 Jenjang Kaderisasi Formal PKS, sumber : M Imdadun Rahmat, hlm. 275-277

49 *Ibid.*,

*Pertama*, Training Orientasi Partai I (TOP I). Pada tahap ini dilakukan pengenalan dasar mengenai partai. Kader yang lulus pada jenjang ini terdaftar menjadi anggota pemula dan memiliki kartu anggota partai. Selain mengikuti training pertama ini, para kader pun dibina dalam Taklim Rutin Partai (TRP).<sup>50</sup>

*Kedua*, Training Orientasi Partai II (TOP II). Di jenjang kedua ini, peserta yang telah memegang Kartu Tanda Anggota (KTA) dan telah mengikuti Taklim Rutin Partai (TRP) ditargetkan untuk memenuhi syarat guna mengikuti Tarbiyah di level pemula. Peserta pada jenjang kedua disebut sebagai anggota pemula (Tamhidi). Peserta diberikan pemahaman seperti konstitusi dan asas PKS, atribut dan dokumen tentang identitas PKS, sanksi-sanksi pelanggaran kepartaian dan posisi PKS dalam kancah politik nasional di era reformasi.<sup>51</sup> Jenjang kedua ini setara dengan program “Tarbiyah untuk pemula”, dimana peserta dibagi dalam kelompok dengan anggota 5-10 orang, kemudian dibimbing oleh seorang murabbi. Selanjutnya, peserta yang telah lulus di tahap ini disebut sebagai Anggota Pemula Terbina dan memiliki kewajiban mengikuti kegiatan kader seperti Training Rutin Kader (TRK), Pelatihan-Pelatihan Kepartaian (PPK), dan Kegiatan Internal Partai (KIA).

*Ketiga*, Training Dasar I (TD I). Tahap ini dilaksanakan setelah peserta dinyatakan lulus pada aktivitas di jenjang TOP II dan telah memiliki bukti SKAP (Surat Kelulusan Anggota Pemula)/KTAP (Kartu Tanda Anggota Pemula). Training Dasar I mengacu pada pendidikan Tarbiyah “*manhaj Tarbiyah*” untuk

---

50 *Ibid.*, hlm 275.

51 *Ibid.*

anggota muda, dengan titik tekan perluasan ilmu dan wawasan. Dalam level ini, selain memiliki aspek penguatan ideologi, juga merupakan pembekalan wawasan ilmu-ilmu Islam yang dibutuhkan seorang dai dan aktivis partai.<sup>52</sup>

*Keempat*, Training Dasar II (TD II). Pada tahap ini peserta disebut sebagai anggota muda (*Mu'aayid*). Jenjang ini merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya, hanya saja ditingkatkan kadar kedalaman danawasannya. Selanjutnya setelah lulus di tahap ini maka akan menjadi Anggota Madya (Muntasib).

*Kelima*, Training Lanjutan I (TL I). Jenjang kelima merupakan jenjang terakhir sebelum peserta menjadi anggota Dewasa. Adapun materi yang diberikan, di antaranya adalah dasar-dasar keislaman, pengembangan diri, dakwah dan pemikiran Islam serta wawasan sosial kemasyarakatan.<sup>53</sup> Materi tersebut merupakan penyempurnaan dari materi yang telah diberikan sebelumnya.

*Keenam*, Training Lanjutan II (TL II). Pada jenjang keenam ini peserta menjadi anggota Dewasa dan telah mencapai taraf anggota ahli (Amil), di mana memiliki kemungkinan untuk dinominasikan guna mengisi jabatan-jabatan dalam partai.

*Ketujuh*, Training Manajemen dan Kepemimpinan Sosial (TMKS). Setelah lulus dari tahap terakhir kaderisasi ini akan memiliki predikat sebagai Anggota Purna, di mana telah menjadi anggota tertinggi dalam penjenjangan kader di PKS.

PKS pun memiliki anggota kehormatan, di mana anggota tersebut merupakan orang-orang yang diangkat oleh PKS karena

---

52 *Ibid.*,

53 *Ibid.*, hlm 277

kriteria tertentu. Penentuannya dilakukan melalui prosedur Analisa Kapasitas dan Integritas Personal (AKIP) dan anggota kehormatan ini tetap harus mengikuti orientasi partai yang disebut Orientasi Partai dan Tokoh (OPT).<sup>54</sup>

Hingga kini, gerakan tarbiyah menjadi gerakan dakwah yang eksis, disegani, dan mendapat simpati luas dari khalayak.<sup>55</sup> Eksistensi gerakan Tarbiyah tidak terlepas dari sistem pembinaan yang dilaksanakan, sehingga PKS mengadopsinya dalam sistem kaderisasi formal partai. Sistem kaderisasi formal PKS seperti pada tahap Training Dasar I mengacu pada sistem pendidikan Tarbiyah yakni “*manhaj Tarbiyah*” dengan materi pendidikan tentang wawasan ilmu Islam dan bekal menjadi seorang pendakwah sekaligus aktivis partai. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem Tarbiyah memengaruhi sistem kaderisasi formal PKS. Dengan sistem kaderisasi yang demikian tertata menunjukkan kesiapan PKS sebagai sebuah organisasi politik. Setiap kader PKS harus melewati tahapan kaderisasi yang sudah ditentukan oleh partai sehingga PKS dapat menjamin bahwa ideologi dan cita-cita partai akan mengakar pada setiap kader-kadernya.

### **A.3. Dinamika Suara PKS**

Keberhasilan sebuah partai politik diukur melalui kemampuannya memobilisasi pemilih dan memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Partai politik berbeda dengan organisasi lain karena partai memiliki orientasi pada kekuasaan. Untuk

---

54 *Ibid.*

55 Edward, Djoni. 2006. *Efek Bola Salju PKS*. Bandung: PT Syaamil Cipta Media, hlm 17.

memperoleh kekuasaan, partai harus unggul dalam pemilu. Dengan nama PK, partai mengikuti pemilu tahun 1999. Karena gagal melewati *electoral threshold* pada masa itu, partai kemudian berganti nama menjadi PKS. Setelah berganti nama menjadi PKS, partai telah mengikuti tiga kali pemilihan yakni tahun 2004, 2009, dan 2014. Pada pemilu tahun 2004, PKS berhasil memperoleh suara sejumlah 8.149.457 (7,34%) dengan jumlah kursi legislatif sebanyak 45 kursi. Pada pemilu 2009 PKS meraup suara sebesar 8.204.946 (7,89%), dengan jumlah kursi 57.<sup>56</sup> Kemudian pada pemilu 2014 PKS mengalami penurunan suara dan memperoleh 6,79%.<sup>57</sup>

Pemilu tahun 2004 menjadi pemilu pertama bagi PKS setelah bertransformasi dari Partai Keadilan. Pada pemilu ini PKS disebut sebagai *the rising star*. Julukan itu diperoleh karena keberhasilan PKS dalam meraup suara di pemilu 2004. Perolehan suara PKS yang cukup tinggi dipercaya karena keberhasilan partai mengelola strategi kampanye untuk menarik suara masyarakat. PKS memilih strategi dengan menjual isu-isu universal kepada masyarakat, terutama citra partai sebagai partai yang bersih dan anti korupsi. Selain itu, dengan sistem kaderisasi PKS yang mengakar, jaringan PKS yang dibangun di antara kadernya semakin lama semakin luas.

Keberhasilan pemilu 2004 dengan mengusung isu yang universal, mendorong PKS pada masa menjelang pemilu 2009

---

56 KPU. *Modul Hasil Pemilu*.(Online).([http://kpu.go.id/dmdocuments/modul\\_1d.pdf](http://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1d.pdf), diakses pada 27 Mei 2016).

57 KPU. *Persentase Hasil Perolehan Partai*.(Online). (<http://www.kpu.go.id/index.php/persentasepartai>, diakses pada 27 Mei 2016).

mengampanyekan diri sebagai partai terbuka. PKS menggeser strateginya dengan kampanye melalui iklan politik yang mencitrakan diri sebagai partai berbagai lapisan masyarakat, menunjukkan bahwa tidak membatasi diri pada pemilih Islam. Perolehan suara pada pemilu 2009 PKS meningkat tipis sebanyak 0,55% dari pemilu sebelumnya. Hal tersebut membuktikan bahwa strategi PKS belum mampu meningkatkan suara partai dengan signifikan.

Selanjutnya, pascapemilu 2009 citra partai terancam karena kasus suap dan pencucian uang impor daging sapi yang menjerat ketua umum partai, yakni Lutfi Hassan Ishaq pada tahun 2013, yang saat itu juga menjabat sebagai anggota DPR. Partai yang selama ini memiliki citra sebagai partai bersih, tercoreng akibat kasus tersebut. Pada pemilu 2014 PKS mengalami penurunan suara, tetapi tidak menurun secara drastis. Penurunan suara PKS dari pemilu sebelumnya sebesar 1,1%, tidak setinggi penurunan suara yang terjadi pada Partai Demokrat. Hal tersebut menunjukkan bahwa PKS memiliki pemilih tetap. Keseriusan PKS membangun organisasi, membuahkan hasil yakni militansi mendukung partai tidak mudah tumbang meskipun sedang diterpa isu negatif.

#### **A.4. Tawar Menawar Ideologi dan Partai Terbuka**

PKS dengan identitas berideologi Islam mengalami hambatan dan dilema dalam perjalanan karirnya. Partai akhirnya terbawa arus mengejar kepentingan elektoral. Kebutuhan meningkatkan suara konstituen terkadang membuat keputusan partai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip nilai perjuangan yang disepakati bersama di awal. Dalam kasus PKS, nilai-nilai yang menjadi

dasar pijakan dari didirikannya partai ini adalah sebagai Partai Dakwah.<sup>58</sup> PKS menelan ideologinya sendiri dengan menggeser strategi kampanye dan menjual dirinya sebagai partai milik semua kalangan. Kondisi tersebut membawa PKS pada kebimbangan apakah tetap sebagai “*partai kader*” dengan ciri militan atau sebagai “*partai terbuka*” dengan ikatan yang cair.<sup>59</sup>

Menjelang pemilu 2009, dengan iklan politik, PKS mengumumkan bahwa partainya milik siapa saja. PKS ingin menjangkau suara di luar massa tradisionalnya dengan bergeser dari partai ideologis ke partai *catch all*. Namun, seperti yang dijelaskan Faisal Arif Kamil dalam skripsinya “Kegagalan Perluasan Basis politik PKS melalui Iklan Politik” menunjukkan bahwa iklan politik PKS yang menampilkan beberapa kelompok masyarakat di luar pemilih tradisional PKS tidak berhasil membantu PKS dalam memperluas basis pemilihnya.

Dalam penelitian tersebut dianalisis empat *scene* iklan politik PKS yang dianggap menunjukkan upaya PKS menarik massa di luar pemilih tradisionalnya. Pertama, *scene* dua orang dengan karakteristik berasal dari timur Indonesia, dimana sebagian besar masyarakatnya menganut keyakinan nonmuslim. Dalam *scene* tersebut kedua orang yang digambarkan sebagai suami isteri menyatakan PKS itu Partai Keluarga Saya. Kedua, *scene* seorang pemuda Tionghoa yang menyatakan PKS itu Partai Keberuntungan Saya. Hal tersebut kontradiktif dengan basis Islam Tarbiyah yang selama ini dipegang teguh PKS, bahwa Islam tidak

---

58 Nasiwan. 2015. *Dilema Transformasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)* thesis dilema transformasi PKS. Thesis. Universitas Gadjah Mada, hlm 268.

59 *Ibid.*,

mengakui adanya kepercayaan pada keberuntungan (kehokian).<sup>60</sup> Pada *scene* ketiga, perempuan yang tidak berjilbab mengatakan PKS itu Penuh Kasih Sayang. Potongan *scene* tersebut seakan tidak menunjukkan citra PKS sebagai partai dengan ideologi Islam. Keempat, iklan politik tersebut juga menampilkan *scene* dua anak punk yang mengatakan PKS itu Partai Keren Sekali. Adanya *scene* anak punk dalam iklan politik PKS menunjukkan keberanian PKS menasar kelompok yang benar-benar di luar citranya.

Iklan politik PKS yang dikeluarkan menjelang pemilu 2009 mengenai pluralitas menunjukkan mulai bergesernya PKS secara ideologi dan strategi kampanye politik dalam usaha untuk mengambil pemilih di luar basis massa tradisionalnya.<sup>61</sup> Kampanye PKS yang menunjukkan bahwa ada keberagaman dalam partainya justru memberi kekaburan pada karakter PKS yang memiliki basis sosial Islam Religius dan basis massa yang militan. Hal tersebut membuat PKS tidak berbeda dengan partai lainnya. Strategi kampanye PKS tersebut pun belum berhasil menarik pemilih di luas basis sosialnya karena perolehan pemilu tahun 2004 dan 2009 stagnan.

Selain perubahan kampanye politik, perubahan juga bisa dilihat ikrar yang diucapkan anggota. Pada Anggaran Rumah Tangga (ART) PKS tahun 2005 tercantum bahwa anggota memiliki kewajiban menyampaikan ikrar setelah melalui setiap jenjang kaderisasi. Salah satu contohnya bagi anggota pemula diwajibkan mengikrarkan janji sebagai berikut:

---

60 Kamil, Faisal Arif. *Op.cit.*, hlm33

61 *Ibid.*, hlm 143

“Saya berjanji untuk senantiasa berpegang teguh kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, komitmen kepada visi, misi, dan tujuan Partai Keadilan Sejahtera, melaksanakan kewajiban Anggota Partai sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Partai lainnya semaksimal kemampuan, serta tidak membawa dan/atau mengadakan permasalahan internal Partai kepada lembaga, pihak, ataupun orang perseorangan di luar Partai. Allah menjadi saksi atas segala yang saya ikrarkan”.

Sedangkan pada AD/ART PKS tahun 2013, terkait kewajiban anggota tercantum bahwa setiap anggota wajib mengikrarkan janji,

“Saya berjanji untuk senantiasa berpegang teguh kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Partai Keadilan Sejahtera; serta setia kepada pimpinan partai.”

Perubahan tersebut menunjukkan PKS semakin bergeser dari ciri khasnya sebagai partai yang Islamis ke arah partai yang terbuka. Jika sebelumnya bahkan PKS mengikat janji kader dengan ikrar yang memberikan pernyataan berpegang teguh pada Kitab dan Sunnah Rasul, tetapi pada AD/ART tahun 2013 dimana masa menjelang pemilu 2014, PKS hanya mensyaratkan ikrar dengan berpegang teguh pada AD/ART, peraturan, dan setia kepada pemimpin partai.

Dalam strategi kampanye, PKS seakan menyerah dengan segala hal terkait militansi untuk mampu bertahan di panggung perpolitikan nasional. PKS ikut serta bersama dengan partai lain berlomba-lomba merebut hati konstituen untuk meraup suara sebanyak-banyaknya. Padahal partai politik tanpa ideologi tidak memiliki landasan eksistensi dan tidak bisa melakukan

tugas apapun dalam konteks politik. Ideologi dalam pengertian ini mewakili identitas inti partai dan memberikan cetak biru bagi solusi alternatif untuk masalah-masalah masyarakat saat ini.<sup>62</sup> PKS dihadapkan dengan pilihan mempertahankan ideologi atau ambisi untuk mendulang suara. Langkah PKS untuk memenuhi kepentingan perolehan suara justru membuat PKS menelan ideologinya sendiri. Ironisnya, meskipun telah mengampanyekan diri sebagai partai terbuka, menggunakan iklan politik untuk memperluas basis massanya, bahkan melakukan perubahan substansi dalam AD/ART Partai untuk mendukung keseriusan partai menjadi lebih terbuka, cara-cara tersebut masih belum mampu untuk menarik dukungan di luar massa inti atau pendukung tradisionalnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, berikut preferensi urutan pilihan-pilihan politik PKS dalam pengorganisasian partainya berdasarkan perubahan strategi sejak partai lahir hingga sekarang. Preferensi Pilihan Politik PKS:



Gambar 3.2 Urutan Pilihan Politik PKS, sumber: analisa penulis

PKS dalam pengorganisasiannya memilih menjadi partai ideologis yang memiliki akar organisasi, didukung dengan

62 Vassallo, Francesca dan Clyde Wilcox. 2014. *Partai Sebagai Pengusung Ide*, dalam Richard S. Katz dan William Crotty (ed.), *Handbook Partai Politik*. Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm 683.

sistem kaderisasi hingga memiliki massa yang militan. Namun keunggulan dalam pengorganisasian tidak cukup membuat PKS menjadi partai besar. Sebagai sebuah partai politik yang juga berorientasi pada kekuasaan, PKS juga perlu memenuhi kebutuhan dan kepentingan mendulang suara di pemilu. Sebagai partai ideologis, selanjutnya PKS memutuskan mengumumkan diri sebagai partai terbuka. PKS berusaha memenuhi kepentingan elektoral dengan menelan ideologinya sendiri. Namun strategi beresiko yang diambil tersebut nyatanya tidak bisa membantu PKS memperluas basis massanya.

## **B. Partai Demokrat: Partai Bermodal Popularitas**

Partai Demokrat memiliki sejarah yang berbeda dari PKS. Partai Demokrat didirikan pada tahun 2002 karena melihat adanya peluang menarik suara dengan mengandalkan popularitas tokoh. Susilo Bambang Yudhoyono yang akrab disapa SBY menjadi tokoh yang dianggap karismatik dan menjadi ujung tombak perjuangan partai ini. Anas Urbaningrum mengungkapkan bahwa gagasan mendirikan partai politik mulanya muncul dari SBY sendiri.<sup>63</sup> Hal tersebut menunjukkan peran besar SBY sejak berdirinya Partai Demokrat. Dalam waktu singkat, pada 10 September 2001, sekitar dua bulan setelah didirikan, partai berhasil didaftarkan di Departemen Hukum dan HAM RI.<sup>64</sup> Sejarah pendirian partai Demokrat menjadi menarik karena tidak bermula dari sebuah organisasi, melainkan langsung didirikan

---

63 Urbaningrum, Anas.2010.*Revolusi Sunyi Mengapa Partai Demokrat dan SBY Menang dalam Pemilu 2009*.Jakarta: Mizan.,hlm.112

64 *Ibid.*, hlm 113

karena inisiatif dari tokohnya dan didukung oleh para pengusaha dan akademisi.

Popularitas SBY bermula sejak dirinya masuk dalam bursa pemilihan wakil presiden bagi Megawati pada tahun 2001. Setelah Partai Demokrat berdiri, peningkatan popularitas SBY diikuti dengan peningkatan popularitas partai. Pada pemilu pertamanya yakni pemilu 2004, Partai Demokrat berhasil memiliki perolehan suara yang cukup tinggi yakni 7,45 % hingga disebut juga sebagai partai “*the rising star*”. Kemudian, pada pemilu berikutnya, pada 2009 Partai Demokrat perolehan suaranya meningkat tajam dengan total perolehan 20,10%. Pemilu 2009 menjadi masa di mana Partai Demokrat mengukir sejarah menjadi partai pemenang untuk pertama kalinya setelah 8 tahun berdiri. Tetapi pada pemilu 2014 perolehan suara partai menurun drastis. Penurunan suara diindikasikan karena setahun setelah pemilu 2009 hingga menjelang pemilu 2014, partai dirundung berbagai masalah internal, yang menunjukkan bahwa Partai Demokrat memiliki organisasi yang rapuh.

Keberhasilan partai dengan mengusung SBY di pemilihan presiden 2004 dan 2009 menjadi bukti bahwa popularitas figur menjadi magnet yang dapat menarik dukungan. Tetapi, strategi Partai Demokrat yang terus meningkatkan elektabilitasnya dengan mengelola popularitas tokoh akhirnya harus menelan pil pahit bahwa faktanya, partainya rapuh. Partai Demokrat sejak awal bergantung pada kekuatan figur SBY dan tidak memiliki kekuatan pada sisi organisasi. Partai fokus pada kepentingan untuk menang dalam pemilihan, menjadikan SBY sebagai presiden, dan mengabaikan proses membangun organisasinya. Partai lemah dalam melakukan intervensi terhadap kader-

kadernya untuk bertindak dan berperilaku sesuai dengan visi dan misi partai, menyebabkan pertarungan kepentingan personal sangat kental. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya kader yang menduduki posisi penting di pemerintahan terjerat tindak pidana korupsi, dan berakibat pada menurunnya elektabilitas partai secara drastis.

### **B.1. Demokrat ya SBY, SBY ya Demokrat**

Gagasan utama mendirikan partai Demokrat adalah guna mendukung seorang tokoh yang dianggap berwibawa dan berpotensi menjadi pemimpin nasional. Sejarah berdirinya partai ini dilatarbelakangi adanya peluang SBY menjadi presiden setelah mengikuti bursa pemilihan wakil presiden untuk Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001. Sebagai pendatang baru di panggung perpolitikan nasional, SBY mampu masuk dalam putaran kedua dari total tiga putaran, namun akhirnya harus menerima kekalahan dalam pemilihan wakil presiden kala itu. Meskipun gagal, ada pihak seperti Vence Rumangkang yang merupakan seorang pengusaha menyatakan dukungan kepada SBY, yang menilai bahwa SBY berpeluang untuk menjadi presiden. Vence percaya bahwa SBY dapat meningkatkan stabilitas politik yang berakar pada nasionalisme sekuler.<sup>65</sup> Pendirian Partai Demokrat diinisiatif langsung oleh SBY dan direalisasi oleh Vence Rumangkang yang kemudian menjabat sebagai Bendahara

---

65 Honna. Jun.2012.*Inside The Democrat Party: Power, Politics and Conflict in Indonesia's Presidential Party*, dalam Jurnal South East Asia research,20,4, pp 473-489., hlm 475.

Umum partai. Pembentukan partai Demokrat dapat dikatakan didominasi oleh kalangan pengusaha dan akademisi.

Proses persiapan hingga terbentuknya Partai Demokrat hanya memakan waktu kurang dari dua bulan. Partai disahkan pada tanggal 2 September 2001.<sup>66</sup> Sejak awal berdiri, Demokrat telah memposisikan diri sebagai partai pengusung calon presiden. Berdiri di tahun 2001 membuat Demokrat memiliki waktu sekitar tiga tahun untuk mempersiapkan diri mengikuti pemilu tahun 2004. William Liddle mengungkapkan bahwa SBY populer melalui pemberitaan di daerah-daerah konflik sebagai sosok yang oleh masyarakat dinilai sabar, kalem, dan berwibawa.<sup>67</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa personalistik SBY memiliki peran besar bagi Partai Demokrat. Popularitas Partai Demokrat berada di belakang popularitas SBY. Dengan demikian, seiring berjalannya waktu, popularitas partai Demokrat juga terus meningkat.

Menjelang pemilu 2004, kondisi perpolitikan nasional semakin memanas. SBY yang saat itu masih tergabung dalam Kabinet Gotong Royong pada masa pemerintahan Megawati mulai melakukan sosialisasi politik untuk kepentingannya mencalonkan diri sebagai presiden. Pada 1 Maret 2004, Sesmenko Polkam Sudi Silalahi menyatakan, SBY merasa dikucilkan oleh Presiden Megawati karena tidak dilibatkan dalam pembahasan PP Kampanye Pejabat Tinggi Negara dan Istana merespon bahwa

---

66 *Ibid.*, hlm 113.

67 Koirudin. 2004. *Profil Pemilu 2004 : Evaluasi Pelaksanaan, Hasil dan Perubahan Peta Politik Nasional Pasca Pemilu Legislatif 2004*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar., hlm 176.

SBY sedang berada di Beijing.<sup>68</sup> Perseteruan antara dua pihak tidak terhindarkan. Ditambah dengan pernyataan Taufik Kiemas mengenai SBY yang dinilai seperti anak kecil, di mana SBY sebagai bagian dari kementerian seharusnya melapor kepada presiden apabila memiliki rencana mencalonkan diri sebagai presiden. Konflik diakhiri dengan mundurnya SBY dari kabinet Gotong Royong dan melangkah pasti untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Perseteruan tersebut banyak disorot media, sehingga memberikan kesempatan bagi nama SBY untuk semakin dikenal publik. Dengan kata lain, konflik yang terjadi malah memberikan keuntungan karena berpotensi meningkatkan popularitas SBY.

Partai Demokrat memilih menerapkan ideologi Nasionalisme Religius. Dengan kata lain, Partai Demokrat mengambil konsep jalan tengah, dimana partai bukanlah partai agama tetapi juga bukan partai dengan corak sekuler. Sikap nasionalisme dan religius adalah nilai filosofi yang telah demikian melekat dalam diri bangsa Indonesia.<sup>69</sup> Partai Demokrat membuat klaim bahwa pilihan menjadi partai nasionalisme religius berarti mewakili preferensi seluruh masyarakat Indonesia yang berjiwa nasional, tetapi juga tidak meninggalkan nilai-nilai agama dalam kehidupannya. Selain itu dalam AD/ART dituliskan dengan jelas makna dari ideologi Nasionalisme Religius yang dimaksud oleh Partai Demokrat, yakni kerja keras untuk kepentingan rakyat dengan landasan moral dan agama serta memperhatikan aspek nasionalisme, humanisme, dan pluralisme dalam rangka mencapai

---

68 Riyanto, Guruh Dwi dan Pebriansyah Ariefana.2014.*Rapor Capres Analisis dan Prediksi Menuju RI I*.Yogyakarta: Galang Pustaka, hlm 48.

69 Urbaningrum, Anas.Op.cit., hlm 298.

tujuan perdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.<sup>70</sup> Hal tersebut menegaskan pilihan partai Partai Demokrat mengambil ideologi yang dapat mencakup seluruh preferensi masyarakat, dengan sasaran pemilih partai berideologi agama maupun pemilih partai berideologi Nasionalis.

William Liddle menilai bahwa platform jalan tengah dengan menggabungkan nasionalisme dan religius yang diusung partai Demokrat merupakan sebuah kekaburan.<sup>71</sup> Partai ini tidak mengakui bahwa mereka sekuler tetapi juga tidak menegaskan dirinya sebagai partai agama. Anas Urbaningrum dalam bukunya “Revolusi Sunyi” mengungkapkan bahwa justru dengan platform nasionalis-religius membuat Partai Demokrat berhasil merebut simpati rakyat dalam waktu cepat dan menang pada pemilu 2009. Partai memandang ideologi tengah sebagai strategi yang tepat untuk mencapai kemenangan. Ketokohan SBY menjadi sebuah “nilai jual” bagi masyarakat dan ideologi tengah yang diterapkan partai menjadi pelengkap karena memiliki tujuan mengambil pemilih dari ceruk nasionalis dan agama, sehingga tidak membatasi pemilih dengan preferensi nasionalis ataupun religius. Partai Demokrat mampu memperoleh suara yang cukup signifikan dari masyarakat dengan memanfaatkan popularitas tokohnya.

## **B.2. Misi Partai Demokrat: Mengusung SBY**

Partai Demokrat memiliki tujuan mengusung figur SBY sebagai presiden, sehingga partai didirikan sebagai kendaraan

---

70 Partai Demokrat. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat*.

71 Urbaningrum, Anas. *Op.cit.*, hlm 293.

politik agar dapat mencalonkan SBY menjadi presiden. Namun, Partai Demokrat tidak dapat begitu saja mengabaikan fungsi dasarnya sebagai organisasi politik, di antaranya adalah rekrutmen politik. Pada tahap awal, partai Demokrat yang bukan bermula dari sebuah organisasi memiliki pekerjaan rumah untuk membentuk perwakilan dan anggota hingga ke level lokal. Dapat dikatakan bahwa Partai Demokrat membentuk organisasi politiknya dari nol, sehingga Partai Demokrat harus berusaha lebih keras dalam mengumpulkan massa. SBY sebagai tokoh sentral partai menjadi daya tarik utama dan nilai tawar dalam memenuhi prasyarat pendirian partai. Untuk memenuhi kebutuhan akan anggota dan memiliki calon potensial, baik di pemilu legislatif ataupun lokal, pendiri Partai Demokrat selanjutnya melakukan penggalangan dana dan kampanye perekrutan secara intensif dengan memanfaatkan koleganya untuk memenuhi target keanggotaan partai.<sup>72</sup>

Peraturan keanggotaan dan kaderisasi partai Demokrat diatur secara tertulis dalam AD/ART partai. Kaderisasi merupakan salah satu modal penting dalam melaksanakan pengorganisasian partai politik. Sistem kaderisasi yang dilaksanakan dengan baik, bisa menghasilkan kader-kader yang memiliki loyalitas pada organisasi. Kejatuhan Partai Demokrat di pemilu 2014 dihubungkan dengan kegagalan partai Demokrat dalam melakukan kaderisasi, dikarenakan misi utama adalah menjadi kendaraan politik guna mengusung tokoh mereka, yakni SBY.

Subur Budhisantoso mengatakan bahwa tidak ada kriteria sama sekali dalam proses seleksi anggota Partai Demokrat.

---

72 Honna, Jun. *Op.cit.*, hlm 476

Anggota cabang lokal Partai Demokrat hanya meminta kenalan mereka untuk bergabung dengan partai dan mencalonkan diri di pemilihan umum.<sup>73</sup> Hal tersebut menjadikan basis sosial Partai Demokrat berasal dari kalangan atas yang memiliki modal finansial ataupun modal sosial secara personal. Partai Demokrat seperti alternatif yang tepat bagi orang-orang yang memiliki ambisi untuk mendapatkan kekuasaan dan kekayaan.<sup>74</sup>

Pada awalnya, SBY tidak secara terbuka menyatakan dirinya menjadi bagian Partai Demokrat. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pendiri dalam mengumpulkan orang-orang yang mau bergabung dan menjadi anggota partai. Setelah SBY menyatakan diri sebagai bagian dari Partai Demokrat, jumlah anggota partai bertambah secara signifikan dalam waktu singkat.<sup>75</sup> Ketokohan SBY tidak dapat ditampikkan lagi kehadirannya di dalam partai ini. Segala sesuatu yang dipersiapkan partai setelah berdiri sebagai persiapan untuk dapat mengusung SBY sebagai presiden di pemilihan langsung 2004.

Partai Demokrat membagi keanggotaan partai menjadi tiga, yakni anggota biasa, anggota kehormatan, dan simpatisan.<sup>76</sup> Anggota kehormatan merupakan setiap orang yang berjasa dalam perjuangan partai dan ditetapkan oleh DPP. Simpatisan

---

73 Wawancara dengan Subur Budhisantoso dalam J Hona. Jun.2012.*Inside The Democrat Party: Power, Politics and Conflict in Indonesia's Presidential Party*, hlm. 476.

74 Honna, Jun.*Op.cit.*, 476-477.

75 Boroma, Suhendro.2010.*Sejarah dan Kemenangan Partai Demokrat*.Jakarta: Jala Permata., hlm 405.

76 Partai Demokrat.2015.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tahun 2015.

merupakan pendukung perjuangan partai tetapi tidak menjadi anggota. Sedangkan terkait dengan sistem kaderisasi anggota biasa, kader partai dibedakan lagi menjadi 4 yakni calon kader (belum mengikuti pengkaderan), kader muda (anggota yang telah mengikuti pelatihan), kader madya (anggota yang telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan dari DPD), kader utama (telah mengikuti berbagai pelatihan DPP).

Pada awal berdiri, kader yang tergabung sebagai anggota sebagian besar adalah kenalan ataupun kolega dari para pendiri, sehingga unsur kekerabatan dan nepotisme sangat kental dalam pengorganisasian Partai Demokrat. Pada pemilu legislatif 2004, komposisi anggota parlemen dari Partai Demokrat antara lain pensiunan militer 14%, pengusaha 45%, birokrat (12%), akademisi (10%), guru (8%), dan pekerja media (8%).<sup>77</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anggota parlemen yang diusung oleh Partai Demokrat dan berhasil menduduki kursi parlemen adalah pengusaha. Para kader partai bersatu padu memenuhi syarat menjadi peserta pemilu dan memperoleh suara agar dapat mengusung SBY menjadi calon presiden. Dengan tujuan awal demikian, pengorganisasian tidak benar-benar menjadi fokus dalam partai ini, yang utama adalah cara agar memperoleh suara. Apa yang dilakukan Partai Demokrat tersebut justru menunjukkan bahwa partai tidak memiliki kejelasan ideologi dan cenderung mencari posisi aman demi memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu.

---

77 Honna, Jun. *Op.cit.*, hlm 477.

### **B.3. Dinamika Suara Partai Demokrat**

Partai Demokrat lahir pada era reformasi. Partai telah mengikuti tiga kali pemilu di tahun 2004, 2009, dan 2014. Partai Demokrat memilih mengelola popularitas dalam membangun citra partainya untuk meraup suara sebanyak-banyaknya di pemilu. Ketergantungan partai pada pengelolaan popularitas membuat partai mengalami masalah dalam raihan suara saat partai dirundung konflik internal dan kader-kader di level nasional terjerat kasus korupsi.

Partai Demokrat untuk pertama kalinya menjadi peserta pemilu pada tahun 2004. Partai yang berdiri 3 tahun sebelum pemilu ini berhasil memperoleh suara yang cukup baik hingga mendapat julukan sebagai *rising star* bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera. Partai Demokrat memperoleh suara sebanyak 7,45%, mengalahkan partai-partai yang telah ada jauh sebelum era reformasi, seperti PAN yang harus puas dengan perolehan suara sebesar 6,44%.<sup>78</sup> Perolehan suara yang cukup tinggi di pemilu 2004 membuat partai demokrat menjadi salah satu partai yang diperhitungkan di perpolitikan nasional. Di tahun yang sama, Partai Demokrat juga mengantarkan SBY menjadi presiden.

Pada pemilu tahun 2009, partai Demokrat semakin menunjukkan taringnya dengan menjadi partai pemenang. Perolehan suara Partai Demokrat meningkat tajam dari 7,45% menjadi

---

78 *Urbaningrum, Anas. Op.cit.*, hlm 303.

20,10%.<sup>79</sup> Kemenangan Partai Demokrat tidak terlepas dari ketokohan SBY dan kemampuan partai mengelola popularitas. Partai Demokrat sangat menjaga relasi dengan SBY, karena popularitas Partai Demokrat berada di balik figur SBY. Pada masa kepemimpinan SBY sebagai presiden di tahun 2004-2009 telah berhasil menarik perhatian masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang populis, di antaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras untuk rakyat miskin (Raskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Jamkesmas. Ketergantungan yang kuat pada figur membuat apa yang dilakukan oleh SBY memberikan bias kepada partai. Ditambah, selain SBY, Partai Demokrat juga memiliki kader populer di pemilu 2009, di antaranya Ruhut Sitompul, Edhie B. Yudhoyono, Anas Urbaningrum, Venna Melinda, Angelina Sondakh, Roy Suryo dll.<sup>80</sup>

Perolehan suara yang mencapai 20,10% pada pemilu 2009 melancarkan Partai Demokrat kembali mengusung SBY sebagai calon presiden. Dapat dikatakan bahwa pemilu tahun 2009 menjadi masa kejayaan Partai Demokrat. Tetapi setahun pascapemilu, partai mulai mengalami kemunduran baik secara popularitas maupun pengorganisasian akibat dari konflik internal dan kader-kadernya di tingkat nasional terjerat kasus korupsi. Hal tersebut menyebabkan penurunan elektabilitas Partai Demokrat

---

79 KPU. *Persentase Hasil Perolehan Partai*. (Online). (<http://www.kpu.go.id/index.php/persentasepartai>, diakses pada 27 Mei 2016).

80 KPU. *Daftar Calon Terpilih Anggota DPR RI Hasil Pemilu Tahun 2009*. (Online). ([http://www.kpu.go.id/dmdocuments/DAFTAR\\_ANGGOTA\\_DPR\\_2009.pdf](http://www.kpu.go.id/dmdocuments/DAFTAR_ANGGOTA_DPR_2009.pdf), diakses pada 27 Mei 2016).

pada pemilu selanjutnya. Berbeda dengan dua pemilu sebelumnya yang mengusung SBY menjadi presiden, di tahun 2014 Partai Demokrat memilih tidak mengusung siapapun sebagai calon presiden. Meskipun sebelumnya partai telah melaksanakan konvensi untuk menentukan calon presiden yang akan disung Partai Demokrat. Tetapi menjelang pemilu 2014, hasil konvensi hanya sebagai angin lalu. Perolehan suara partai pada pemilu tahun 20014 mengalami penurunan drastis (10,19%).

Pada awal kehadirannya, partai Demokrat mampu menarik perhatian pemilih hingga memperoleh suara yang cukup tinggi. Bagi pendatang baru, perolehan suara Partai Demokrat di pemilu 2004 merupakan prestasi. Kemudian prestasi kembali diraih dengan berhasil menjadi partai pemenang di pemilu 2009. Namun partai mengalami kegagalan serius di pemilu tahun 2014. Selain persoalan kaderisasi, kekaburan ideologi Partai Demokrat membuat partai kesulitan mengidentifikasi basis massa inti atau pendukung loyal dari partai tersebut. Peningkatan dan penurunan suara yang drastis menunjukkan kecenderungan bahwa pemilihnya adalah *swing voters*, yakni pemilih yang tidak memiliki kesetiaan pada partai politik manapun dan keputusannya tidak dapat diprediksi sehingga dapat berubah-ubah di setiap pemilu. Akar organisasi politik sejak awal tidak kuat karena hanya mengandalkan popularitas tokoh, sehingga ketika terjadi persoalan secara ketokohan, partai tidak mampu mempertahankan posisi sebelumnya.

#### **B.4. Organisasi Rapuh: Oligarki sebagai Harapan**

Partai Demokrat yang terlalu mengandalkan tokoh menunjukkan budaya oligarki yang kental dalam pengelolaannya. Dalam struktur organisasi Partai Demokrat, SBY selalu ditempatkan menjadi pimpinan tertinggi partai, yakni Ketua Majelis Tinggi. Ketika menjabat menjadi presiden, SBY menjadi Ketua Dewan Pembina Partai sekaligus Ketua Majelis Tinggi dan Ketua Dewan Kehormatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengorganisasian partai tidak dapat lepas dari posisi kuat SBY dalam pengambilan keputusan strategis partai.

Pascapemilu 2009, Partai Demokrat mengalami permasalahan internal dan kader-kadernya terjerat kasus korupsi. Pada saat nama Anas Urbaningrum yang kala itu sedang mengemban amanat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat disebut terlibat kasus tindak pidana korupsi, muncul perseteruan antara pendukung loyal Anas dan sebagian kader lain yang menuntut agar Anas mundur dari jabatannya. Selama kasus keterlibatan Anas belum pasti, kondisi internal partai memanas. Hingga akhirnya Anas ditetapkan sebagai tersangka dan posisi ketua umum kosong, diselenggarakanlah Kongres Luar Biasa yang menghasilkan dipilihnya kembali SBY sebagai ketua umum.

Jika sistem dan fungsi jabatan struktural partai berfungsi dengan baik, Dewan Kehormatan partai menjalankan tugasnya dengan memeriksa dan menjatuhkan sanksi kepada kader yang terlibat kasus pidana. Tetapi yang terjadi di lapangan, tidak ada upaya meredam konflik internal sebelum ada kepastian hukum. Hal tersebut memberikan kerugian bagi citra partai karena terus

menjadi sorotan media dan masyarakat. Dipilihnya SBY menjadi ketua umum kembali semata-mata untuk menyelamatkan citra partai. Sosok karismatik SBY diharapkan dapat menarik masyarakat dan menyatukan internal partai yang sempat terpecah. Meskipun pada akhirnya penurunan elektabilitas partai tidak dapat dihindari. Tidak hanya itu, jabatan Ketua Majelis Tinggi yang mana menurut AD/ART sebelumnya dijabat oleh Ketua Dewan Pembina, dialihkan kepada Ketua umum. Dituliskan dalam AD/ART tahun 2015, “Ketua Majelis Tinggi Partai masa bakti 2015-2020 dijabat oleh Ketua Umum.”<sup>81</sup> Hal tersebut menunjukkan kepengurusan dan pelaksanaan fungsi utama terpusat sepenuhnya pada SBY.

Berikut preferensi pilihan partai demokrat sejak partai lahir, proses kaderisasi, proses perolehan hasil pemilu, hingga melahirkan adanya konsekuensi yang belum mampu dipenuhi oleh partai Demokrat.

#### Preferensi Pilihan Pengorganisasian Partai Demokrat:



*Gambar 3.3 Urutan Pilihan Politik Partai Demokrat,  
sumber: analisa penulis*

81 Partai Demokrat.2015.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tahun 2015.

Partai Demokrat mengawali organisasi politiknya dengan melihat adanya peluang mencalonkan SBY sebagai tokoh yang dianggap karismatik dan memiliki popularitas yang berpotensi memenangkan hati rakyat. Partai didirikan dengan tujuan melahirkan pemimpin nasional, yang mengindikasikan keinginan pendiri partai untuk mencalonkan SBY menjadi Presiden di pemilu 2004, mengingat partai didirikan tahun 2002 yang merupakan tiga tahun sebelum diselenggarakannya pemilihan presiden.

Sejak Partai Demokrat berdiri, telah melalui tiga kali pemilu, perolehan suara Partai Demokrat bisa meningkat tajam pada pemilu keduanya yakni 2009 dan mengalami penurunan drastis pada pemilu 2014. Penurunan popularitas partai diindikasikan karena tindak pidana yang menjerat kader-kadernya di level nasional sehingga menyebabkan kekecewaan masyarakat pada performa partai. Selain itu pengorganisasian yang lemah ditunjukkan dengan lambatnya partai menyelesaikan konflik. Selain SBY selalu ditempatkan sebagai tokoh sentral dalam partai menunjukkan bahwa kekuatan Partai Demokrat hanya bergantung pada tokoh dan popularitas.

Sosok SBY yang berpengaruh dan kentalnya budaya oligarki dalam tubuh partai menyebabkan organisasi partai lemah dan hanya bergantung pada popularitas. Adanya logika pragmatis yang telah programatik dalam tubuh kepartaian mengindikasikan bahwa esensi partai sebagai artikulator aspirasi publik sudah

semakin hilang.<sup>82</sup> Partai yang hanya bermodalkan popularitas dapat dengan cepat mencapai kejayaan, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk *survive*. Partai bukan hanya mesin pendulang suara untuk mencapai kepentingan tertentu, melainkan organisasi politik yang membutuhkan tata kelola serius sehingga mampu bertahan di segala kondisi agar dapat memperjuangkan cita-citanya untuk kemajuan masyarakat. Kepercayaan dan elektabilitas konstituen tidak dapat hanya diperoleh dengan modal popularitas melainkan harus diimbangi dengan organisasi yang kokoh.

---

82 Wasito Raharjo Jati. 2015. *Memutus Gerontokrasi Partai*. (Online). (<http://www.tempo.co/read/kolom/2015/01/07/1876/Memutus-Gerontokrasi-Partai>, diakses pada 15 September 2016)

# BAB IV

## Partai Mengelola Dilema

### A. Harga dari Sebuah Pilihan

**P**ada pembahasan sebelumnya telah dipaparkan secara runtut pilihan politik PKS dan Partai Demokrat dalam mengelola organisasinya. Masing-masing partai mengalami kondisi dilematis karena pilihan yang telah ditempuh. Dapat ditarik garis besar bahwa PKS memilih kuat dalam organisasi, sedangkan Partai Demokrat memilih kuat di jabatan publik dengan memanfaatkan popularitas. Dari pilihan tersebut, PKS kesulitan memperluas basis massa sedangkan Partai Demokrat memiliki organisasi yang rapuh. Apakah pilihan politik masing-masing partai tersebut salah? Bukan karena PKS atau Partai Demokrat menempuh jalur yang salah dalam pengelolaan organisasinya, melainkan karena dari masing-masing pilihan tersebut ada konsekuensi yang harus dipenuhi. Kondisi dilematis yang dihadapi masing-masing partai merupakan harga yang perlu dibayar oleh partai atas pilihan politik yang diambil.

**Tabel pilihan politik dan dilema yang dimiliki PKS dan  
Partai Demokrat:**

<b>Partai</b>	<b>Pilihan Politik</b>	<b>Dilema</b>
PKS	Transformasi dari organisasi dakwah	Memiliki kekuatan di akar rumput ( <i>ground</i> ) sebagai pendukung setia, tetapi kesulitan untuk mencapai kekuasaan di <i>public officel</i> pemerintah. PKS memilih menjadi partai terbuka
	Ideologi menjadi perekat utama	
	Menghasilkan kader yang militan	
	Basis sosial : aktivis dan organisasi sosial pendukung lain	
	Kekuatan ada di akar rumput ( <i>ground</i> )	
Partai Demokrat	Berawal dari membaca popularitas <i>public figure</i>	Tidak memiliki massa pasti di akar rumput ( <i>ground</i> ), mampu mencapai kekuasaan di <i>public officel</i> pemerintah dengan mengelola popularitas. Tetapi, organisasi sangat rapuh.
	Ideologi kabur, kepentingan menjadi perekat	
	<i>Vote Seeking</i> , tidak berfokus pada membangun kader	
	Basis sosial : pengusaha dan akademisi	
	Popularitas mampu mendulang suara sehingga menguasai <i>public office</i>	

*Tabel 4.1 Perbandingan Pilihan Politik dan Dilema PKS dan Partai Demokrat,  
sumber: analisa penulis*

Perbandingan pilihan politik dan dilema kedua partai dianalisis melalui pengorganisasian partai: bagaimana partai mengelola organisasinya (wajah partai di pusat) memengaruhi kegiatan internal partai dan dapat menarik sumber daya dari wajah partai lainnya (wajah partai di jabatan publik dan akar rumput). Ketiganya saling terkait dan saling memengaruhi. Pilihan politik yang diputuskan partai secara organisasi menjadi dasar dalam melihat dimensi lainnya. Dapat dikatakan bahwa pengelolaan partai politik di tingkat pusat berperan penting dalam memengaruhi pengelolaan partai secara keseluruhan. Sebab, partai sebagai organisasi tidak hanya memikirkan bagaimana menjaga eksistensi di panggung politik, tetapi juga menentukan bagaimana sistem rekrutmen politik, kaderisasi, seleksi kandidat, juga strategi dalam menjalin hubungan dengan masyarakat.

PKS dan Partai Demokrat memiliki pilihan politik yang berbeda dalam mengelola pengorganisasiannya di pusat. PKS sebagai partai ideologis yang berawal dari sebuah organisasi, konsisten dalam membangun organisasinya. Hal tersebut ditunjukkan PKS dalam keseriusan PKS melaksanakan kaderisasi. Kaderisasi dimaknai sebagai dua hal, yakni kaderisasi sebagai pendidikan politik dan kaderisasi sebagai instrumen regenerasi. PKS melaksanakan keduanya. Proses kaderisasi dilakukan secara bertahap dan memiliki materi yang berbeda di tiap tingkatnya. Pemberian materi-materi tentang partai merupakan wujud dari pendidikan politik, sehingga kader memiliki kapasitas yang sama karena mengikuti proses dalam kaderisasi yang tersistem. Hal tersebut bermanfaat membangun militansi dan loyalitas para kadernya. Selain itu, sistem kaderisasi sekaligus mempersiapkan regenerasi bagi partai. Calon-calon pemimpin yang potensial

dan memiliki kapabilitas akan terlihat selama mengikuti setiap tahap sistem kaderisasi.

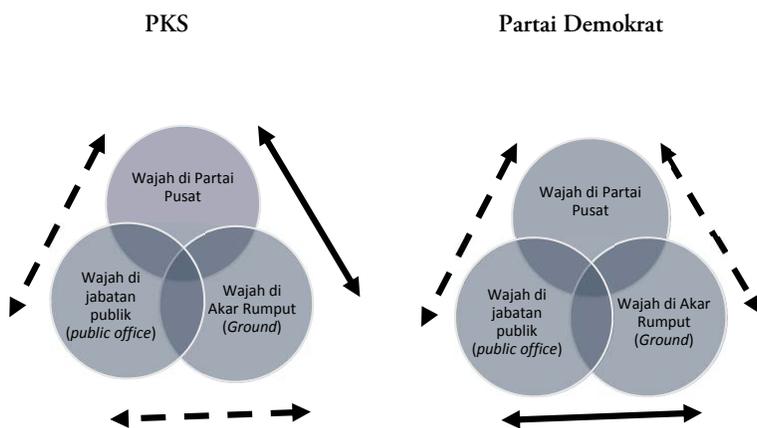
Tetapi pada kenyataannya, sistem kaderisasi yang tertata belumlah cukup untuk mengantarkan PKS menjadi partai pemenang atau sekedar menyaingi partai nasionalis. Perolehan suara PKS unggul di antara partai Islam lainnya, tetapi masih berada di bawah partai nasionalis. Perolehan suara PKS dari tiga kali pemilihan cenderung stagnan, dalam artian tidak mengalami kenaikan atau penurunan yang drastis. Pada akhirnya, PKS yang telah membangun gerakan militansi dan kekentalan ideologi mengampanyekan diri sebagai partai terbuka. Hal tersebut membuat PKS memilih untuk menjadi partai *catch all* dan menelan ideologinya sendiri.

Partai Demokrat sejak kelahirannya memanfaatkan popularitas *figure* dalam melaksanakan pengorganisasiannya. Basis massanya berasal dari relasi atau koneksi para penggagas partai. Partai ini akhirnya lebih kental akan kepentingan-kepentingan dari individu yang bergabung. Pada praktiknya, kaderisasi partai demokrat adalah model kaderisasi spesialisasi. Tidak ada pelaksanaan kaderisasi secara bertahap. Kader direkrut melalui para kolega atau relasi pendiri partai, kemudian ditempatkan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

Partai Demokrat berhasil mengelola popularitas tokoh, tetapi gagal mengelola organisasinya. Akibatnya, organisasinya mudah rapuh ketika dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Kasus korupsi beberapa kader yang menjabat anggota DPR sekaligus pengurus partai menunjukkan lemahnya kemampuan partai sebagai organisasi. Partai dinilai gagal melakukan seleksi kandidat yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas. Partai

semakin mengalami permasalahan internal ketika di tahun 2009 Ketua Umum Partai, Anas Urbaningrum, disebut-sebut terjerat kasus korupsi. Sebelum Anas resmi menjadi tersangka, internal partai terbagi dalam dua kubu yang menuai pro dan kontra akan status hukum Anas. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dewan Kehormatan partai tidak berfungsi dengan baik. Perdebatan dibiarkan berkepanjangan dan diakhiri dengan pengangkatan SBY sebagai ketua umum. Padahal saat itu SBY masih menjabat sebagai presiden. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa partai tidak dapat mengelola permasalahan internal dan mengandalkan sosok SBY sebagai kunci penyelesaian berbagai permasalahan. Akhirnya popularitas partai dilihat dari perolehan suara pemilu 2014 menurun drastis.

Berdasarkan analisis partai di organisasi, terlihat bagaimana keterkaitan antarunsur dalam pengorganisasian PKS dan Partai Demokrat. Berikut adalah konseptualisasi keterkaitan wajah partai pada PKS dan Partai Demokrat



*Gambar 4.1 Konseptualisasi Keterkaitan Tiga Wajah PKS dan Partai Demokrat, sumber : analisa penulis*

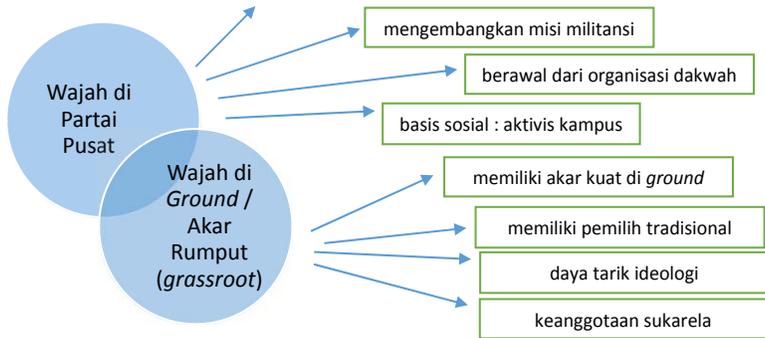
PKS memiliki keunggulan dalam organisasinya dengan adanya ideologi yang jelas dan sistem kaderisasi bertahap sebagai upaya membangun massa yang militan. Hal tersebut menghasilkan hubungan yang kuat antara partai di pusat dan di akar rumput. Sedangkan Partai Demokrat menggunakan popularitas sebagai penarik suara konstituen, menunjukkan dominasi personalistik tokoh dalam pengorganisasian partai. Masyarakat melihat tokoh personal dalam menentukan pilihannya di pemilu. Ini memperlihatkan keterkaitan yang kuat antara partai di jabatan publik dan akar rumput.

PKS dan Partai Demokrat sama-sama memiliki kekuatan pada salah satu kaitan unsur wajah partai. PKS kuat di kaitan organisasi dan akar rumput, sedangkan Partai Demokrat di kaitan jabatan publik dan akar rumput. Ada tiga kaitan yang semestinya dipenuhi oleh masing-masing partai, tetapi baik PKS maupun Partai Demokrat belum mampu memenuhi komponen yang ada dalam dua kaitan lain. PKS belum mampu memenuhi kaitan wajah di pusat dengan jabatan publik dan kaitan wajah di jabatan publik dengan akar rumput. Sedangkan Partai Demokrat belum mampu memenuhi kaitan wajah di pusat dengan jabatan publik dan kaitan wajah di pusat dengan akar rumput.

### **A.1. PKS dan Akar Rumput**

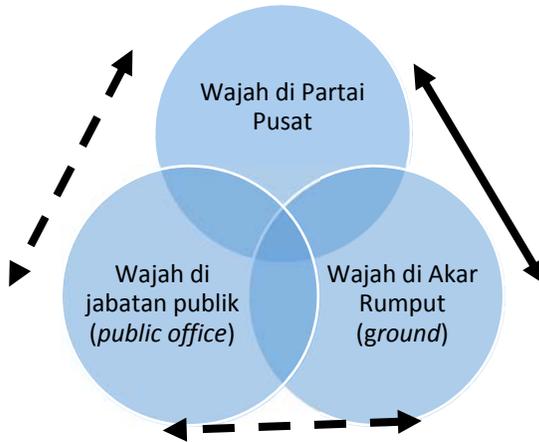
PKS berawal dari sebuah organisasi dakwah kampus, sehingga memiliki keunggulan dalam pengorganisasian partainya. Dengan modal tersebut, PKS mampu merancang kaderisasi yang sistematis dan bertahap untuk menempa kader-kadernya. Posisinya sebagai partai berideologi Islam juga menyederhanakan preferensi bagi masyarakat. Pada pembahasan di bab sebelumnya

telah dipaparkan pilihan politik PKS di mana partai berorientasi pada membangun organisasinya.



*Gambar 4.2 Kaitan Wajah Partai di Pusat dan Akar Rumput PKS, sumber : analisa penulis*

Sejak berdiri PKS menggunakan ideologi sebagai dasar pergerakannya. Hal tersebut terlihat jelas dalam pelaksanaan kaderisasi yang tidak terlepas dari napas pergerakannya sebagai organisasi dakwah. Tahapan kaderisasi tingkat pertama sampai ketujuh, tidak hanya memberikan wawasan kepartaian, tetapi juga nilai-nilai agama. Partai memberikan pendidikan politik dan melaksanakan sosialisasi politik sesuai dengan ideologi Islam. Daya tarik ideologi dan konsisten dalam mengelola organisasinya membuat PKS memiliki akar rumput yang kuat. PKS berhasil membangun kelompok pendukung yang loyal dan militan, di mana para pendukung tersebut sekaligus sebagai pemilih tradisional PKS.



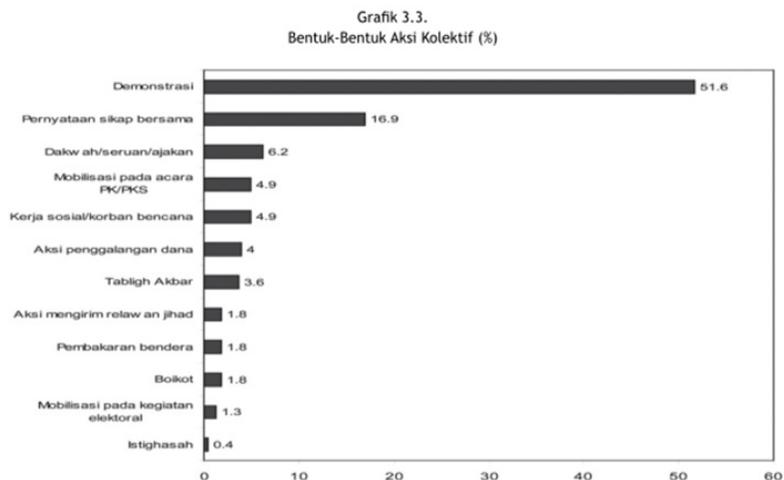
*Gambar 4.4 Konseptualisasi Keterkaitan Antarwajah PKS,  
sumber : analisa penulis*

Dalam pelembagaan partai politik, dikenal istilah penjangkaran partai di masyarakat. Partai dengan sistem yang melembaga akan memiliki akar yang kuat dan stabil di masyarakat.<sup>83</sup> PKS membangun organisasi dan menciptakan penjangkaran partai di masyarakat dengan militansi keanggotaannya. Sejarah organisasi turut memengaruhi strategi partai dalam menyampaikan aspirasi, yakni dengan memobilisasi massa. Hal tersebut ditunjukkan dengan ciri khas PKS sebagai partai yang kerap turun ke jalan atau kerap melakukan aksi demonstrasi. PKS mengembangkan isu-isu nasional seperti kenaikan BBM, tarif listrik, kasus korupsi,

83 Torcal, Mariano dan Scott Mainwaring, 2014. *Institusionalisasi Sistem Partai dan Teori Sistem Partai Setelah Demokratisasi Gelombang Ketiga*, dalam Richard S. Katz dan William Crotty (ed.), *Handbook Partai Politik*. Penerbit Nusa Media, Bandung., hlm. 345.

juga kesenjangan masyarakat, kemudian melakukan aksi kolektif bersama para pendukungnya.

Burhanudin Muhtadi telah melakukan analisis aksi kolektif PKS dalam disertasinya untuk memahami PKS sebagai gerakan sosial. Analisis tersebut memetakan aksi kolektif PKS melalui harian nasional Kompas dan Republika sejak tahun 1980-2007. Bentuk aksi yang paling sering dilakukan PKS dan massa pendukungnya adalah demonstrasi. Tingginya kemampuan partai untuk memobilisasi massa menunjukkan bahwa partai memiliki pengakaran yang kuat di akar rumput.



*Tabel 1 Bentuk Aksi Kolektif PKS, sumber: Muhtadi, Burhanudin., hlm 73*

Keseriusan PKS membangun hubungan dengan anggota/kader ditunjukkan juga dalam Anggaran Rumah Tangga Partai, di mana partai mengatur bahwa setiap anggota wajib mengikuti pembinaan, pendidikan dan pelatihan kepartaian sesuai dengan jenjang anggota. Selain itu harus terlibat aktif dalam kegiatan

dan menjalankan tugas partai. Loyalitas ditingkatkan juga melalui berbagai kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial di masyarakat. Hal tersebut memberikan dampak positif bagi PKS, yakni semakin mempererat hubungan dengan pendukungnya.

Organisasi PKS tidak hanya didukung oleh anggotanya yang telah mendapat pembinaan secara khusus, tetapi juga diperkuat dengan organisasi sayap yang aktif dalam kegiatan kolektif. KAMMI merupakan salah satu organisasi kemahasiswaan yang aktif dan mendukung ide aksi kolektif dari PKS. KAMMI dianggap memerankan diri sebagai sayap mahasiswa PKS.<sup>84</sup> Adanya organisasi sayap yang beranggotakan anak muda yang memiliki intelektualitas dan berkegiatan di kampus, tidak melepaskan sejarah partai yang mana berawal dari organisasi dakwah kampus. KAMMI adalah salah satu gerakan mahasiswa yang berpengaruh dan masih menjadi kekuatan besar di antara gerakan-gerakan mahasiswa di Indonesia.<sup>85</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa PKS terus mempersiapkan regenerasi bagi organisasinya dengan meningkatkan dukungan melalui kelompok akademisi.

Kaitan antara organisasi dengan akar rumput pada PKS dibangun dengan mendalam. PKS bertujuan membangun keanggotaan yang loyal. Maka, apabila seseorang telah menjadi anggota dari partai, anggota tersebut juga memiliki kedekatan secara emosional dengan partai. Hal tersebut karena loyalitas pendukung diperoleh PKS dengan konsistensi partai terhadap sistem yang telah digunakan sejak awal. Dengan begitu, ketika partai mengalami permasalahan internal ataupun diterpa isu

---

84 Muhtadi, Burhanuddin. *Op.cit.*, hlm.63

85 *Ibid.*, hlm 65.

negatif dari luar, organisasi tidak mengalami guncangan yang cukup besar seperti perpecahan internal. Hal tersebut karena partai membangun sistem pengorganisasian yang kuat. Majelis Syuro berperan penting dalam menjaga stabilitas organisasi, sehingga perdebatan antaranggota atau pendukung dalam PKS nyaris tidak pernah terekspose, melainkan para pendukung selalu satu suara dalam memberikan tanggapan berbagai permasalahan.

Kekuatan PKS dalam membangun hubungan dengan akar rumput tidak membuat partai terlepas dari problema dalam pengorganisasian partai. Dalam disertasi Nasiwan yang berjudul “Dilema Transformasi PKS” menunjukkan adanya dilema yang dihadapi PKS sejak bertransformasi dari gerakan dakwah menuju gerakan politik. Adapun dilema-dilema transformasi PKS yang berhasil disimpulkan adalah : (1) dilema untuk tetap mempertahankan doktrin pemikiran Islam dari Ikhwanul Muslimin; (2) dilema partai masih menggunakan strategi gerakan; (3) dilema SDM, kader yang dihasilkan belum memiliki keunggulan saat bekerja di posisi jabatan publik.<sup>86</sup> Dari ketiga dilema transformasi PKS yang disimpulkan oleh Nasiwan, dapat ditarik benang merah bahwa problematika utama adalah memperluas basis massa tanpa menelan ideologi partai di tengah karakteristik partai sebagai partai dakwah dan partai kader.

Kader yang dihasilkan oleh kegiatan Tarbiyah serta massa pendukungnya dinilai Nasiwan belum mampu memecahkan kebuntuan yang dialami oleh partai-partai Islam dalam

---

86 Nasiwan.Op.cit.,hlm. 344

menciptakan basis massa yang lebih luas bagi partai Islam.<sup>87</sup> Hal tersebut disebabkan partai belum mampu menyediakan kader yang kompeten dan kredibel dalam melaksanakan politik praktis meskipun telah melakukan kaderisasi internal. Loyalitas yang tinggi terhadap partai tidak membawa kemajuan yang signifikan bagi partai jika tidak diimbangi ketrampilan politis. Organisasi politik berbeda dengan organisasi lain karena orientasinya pada kekuasaan.

Di negara yang menganut sistem demokratis, pemilu menjadi sarana perebutan kekuasaan bagi seluruh partai politik, tidak terkecuali PKS. Kekuatan ideologi, militansi, dan basis dukungan ternyata belum cukup untuk mengantarkan PKS memperoleh kursi kekuasaan di parlemen ataupun eksekutif. Perolehan suara PKS di setiap pemilu cenderung stagnan. Ketika perolehan suara naik tidak terlalu tinggi, ketika turun juga tidak terlalu drastis. PKS sebagai organisasi politik seperti halnya partai politik yang lain tentu memiliki tujuan menjadi pemenang pemilu sehingga memiliki pengaruh lebih besar dalam pembuatan kebijakan dan jalannya pemerintahan. Selama aktif menjadi peserta pemilu PKS belum mampu mencapai target menjadi partai pemenang. PKS harus aktif dalam mencari koalisi atau menunggu pinangan dari partai lain dalam keikutsertaannya mengusung calon pemilihan presiden.

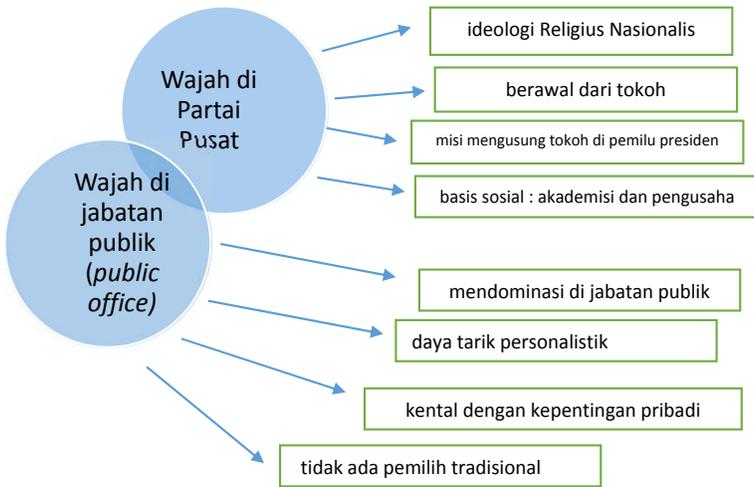
---

87 Adiputra, Dimas.2015.*Politik Pangan Partai Politik (Studi tentang Peran PDIP dalam Membuat Tawaran Kebijakan Pangan di Kabupaten Klaten melalui Pendekatan Tiga Wajah Organisasi Partai)*. Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm 10.

Perolehan suara partai yang cenderung stagnan memberikan dua makna, yakni menunjukkan kemampuan partai menjaga legitimasi dari pendukung loyalnya atau ketidakmampuan partai memperluas basis pendukungnya. Hal tersebut menunjukkan lemahnya keterkaitan partai di akar rumput dan jabatan publik. PKS membangun organisasinya dari bawah dengan menjadi partai berbasis kader, tetapi kesulitan memperluas basis massanya, padahal dukungan diperlukan untuk memiliki kekuasaan di jabatan publik. PKS kemudian mengelola dilema tersebut dengan mengambil langkah pragmatis, yakni mengampanyekan dirinya sebagai partai terbuka, di mana justru mengarahkan PKS bergeser dari partai ideologis menjadi partai “*catch all*”. Pengelolaan dilema seperti itu justru memicu tumbuhnya permasalahan-permasalahan lain. Seperti telah diungkapkan sebelumnya bahwa ideologi menjadi penting dalam hubungan antara individu dan partai. PKS bisa saja kehilangan pemilih tradisionalnya karena partai tidak lagi menjadi preferensi ideologis yang sesuai bagi pemilih.

## **A.2. Partai Demokrat dan Jabatan Publik**

Partai Demokrat memiliki sejarah berbeda dengan PKS. Partai Demokrat didirikan oleh para akademisi dan pengusaha. Dengan mengandalkan jaringan yang luas dari para pendirinya, Demokrat resmi menjadi partai dalam waktu yang cukup singkat. Partai berdiri dengan bayangan kuat dari Susilo Bambang Yudhoyono. Nama dan peran SBY mampu membesarkan nama Partai Demokrat. Kemampuan Partai Demokrat dalam mengelola popularitas tersebut akhirnya mampu membawa partai kepada kejayaan dan memiliki wajah yang kuat di jabatan publik.

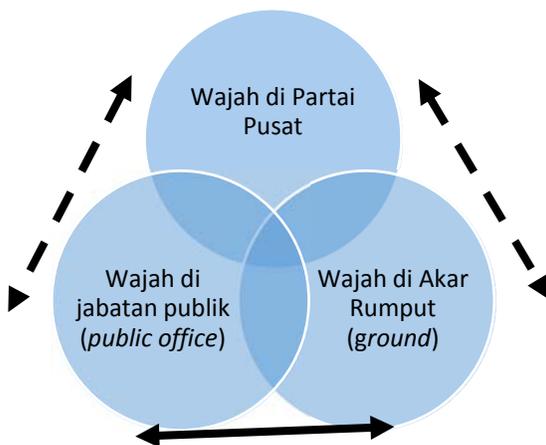


Gambar 4.5 Kaitan Wajah di Pusat dan Jabatan Publik Partai Demokrat, sumber: analisa penulis.

Partai di jabatan publik adalah inti klasik dari partai, yaitu mereka yang memperoleh basis legitimasi atas kesuksesan pemilu.<sup>88</sup> Sejak awal berdiri, Partai Demokrat memiliki tujuan membawa partai mengarah kepada *vote seeking*, sehingga, pengorganisasiannya sekadar untuk memenuhi prasyarat. Para pendiri partai mengisi kekosongan-kekosongan posisi dengan basis kolega atau kenalan pendiri partai. Selain itu, tidak dapat dipungkiri partai ini membuat tokoh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai nilai tawar. Peran SBY dalam partai menjadi pertimbangan bagi para calon kader dan anggota simpatisan partai untuk mendaftarkan diri. Pada pemilu perdananya di tahun 2004, Partai Demokrat memperoleh suara yang cukup besar dan

88 Adiputra, Dimas. *Op.cit*, hlm 10.

berhasil menempatkan SBY sebagai presiden. Kesuksesan menjadi partai pemenang berlanjut di pemilu 2009. Keberhasilannya di pemilu tidak lain karena partai mampu mengelola popularitas sebagai senjata andalan meraup suara dari masyarakat.



*Gambar 4 6 Konseptualisasi Kaitan Tiga Wajah pada Partai Demokrat, sumber : analisa penulis.*

Partai yang mengandalkan kekuatan personalistik dalam menjaring suara membuat partai memiliki kaitan yang kuat antara jabatan publik dan akar rumput. Partai Demokrat juga cenderung mengusung calon-calon yang memiliki popularitas di masyarakat. Para calon pengisi jabatan publik lebih intens berhubungan dengan masyarakat sehingga hubungan yang terjalin lebih dominan antara hubungan personal dan masyarakat. Hal tersebut menyulitkan partai memetakan pendukung tradisional. Tantangan partai di jabatan publik adalah mengendalikan sumber daya karena selain bersama-sama bertujuan menjaring suara sebanyak-banyaknya, anggota partai sebagai kandidat pemilu memiliki kebutuhan

personal seperti visi, program ataupun realisasi janji politik. Hal-hal tersebut menjadi penting untuk selaras dengan partai. Ketika partai tidak memiliki keekatan dengan calon yang diusung, maka partai bisa kesulitan dalam mengontrol anggotanya yang telah berhasil berada di posisi jabatan publik. Adapun keekatan partai dan anggota yang dimaksud adalah loyalitas anggota pada partai yang mengusungnya.

Selain menjadi contoh keberhasilan tingginya popularitas tokoh yang berdampak positif pada perolehan suara di pemilu, Partai Demokrat juga membuktikan bahwa ketika mulai mengalami penurunan popularitas, maka kaitan antara jabatan publik dan akar rumput dapat terputus. Popularitas merupakan keunggulan bagi partai untuk bisa mendapatkan dukungan dengan cepat sehingga mampu menguasai posisi di pemerintah. Tetapi partai politik merupakan organisasi yang membutuhkan sistem pengorganisasian yang utuh, sehingga mesin partai tetap bergerak dan tidak hanya bergantung pada personalistik.

Partai yang lemah di wajah pusat atau organisasinya, secara otomatis berpengaruh terhadap kaitan wajah di pusat dengan jabatan publik dan kaitan wajah di pusat dengan akar rumput. Kelemahan partai di organisasi salah satunya ditunjukkan dengan tidak segera diatasinya konflik internal. *Image* SBY yang dinilai berwibawa dan disukai masyarakat digunakan sebagai penenang saat partai mengalami permasalahan. Setelah penangkapan Anas Urbaningrum, partai mengadakan kongres luas biasa kemudian mengangkat SBY sebagai Ketua Umum. Padahal saat itu SBY masih menjabat sebagai presiden. Strategi tersebut bertujuan meredam konflik internal partai. Kebijakan partai yang demikian

memperjelas bahwa partai tidak memiliki manajemen konflik dalam pengorganisasiannya.

Wajah partai di pusat dan jabatan publik lemah karena partai sebagai organisasi kurang efektif menjalankan fungsinya dalam melaksanakan rekrutmen politik dan kaderisasi, karena hanya untuk sekadar memenuhi syarat. Padahal kader merupakan kepanjangan tangan partai, sehingga kemampuan, integritas, dan loyalitas terhadap partai menjadi penting. Hal tersebut juga menyebabkan kemampuan Partai Demokrat mengontrol kadernya dapat dikatakan lemah. Tidak adanya sistem rekrutmen ataupun kaderisasi yang tersistem menyebabkan hubungan antara partai dan kader cenderung terikat pada kepentingan bukan pada kesamaan ideologi ataupun visi. Akibatnya, Partai Demokrat tidak memiliki kekuatan untuk mengintervensi kader, yang menyebabkan loyalitas kader terhadap partai sangat rendah. Hal tersebut ditunjukkan dengan kader-kader partai yang terjerat kasus korupsi dan berimbas pada elektabilitas partai. Selain itu, Partai juga bisa dengan mudah terpecah belah.

Kaitan wajah partai di pusat dan akar rumput Partai Demokrat juga lemah. Partai yang tidak membangun organisasinya dengan baik tidak mampu membangun loyalitas dan pengakaran di masyarakat. Padahal pengakaran sangat penting bagi partai politik untuk menjamin adanya dukungan. Partai Demokrat memilih menggunakan kekuatan personalistik dan mengabaikan sistem dalam organisasi, sehingga ketika partai terkena isu negatif, dampak yang dirasakan cukup besar. Ditambah dengan kekaburan ideologi nasionalis-religius, dimana partai tidak menegaskan diri sebagai partai sekuler ataupun partai berbasis agama. Hal tersebut memberikan dampak partai tidak mampu mengikat anggota

partai sehingga kepentingan individu sangat kental dan berakibat pada keretakan partai.

## **B. Terobosan bagi PKS dan Partai Demokrat**

### **B.1. PKS Sebagai Pengusung Ide**

Partai politik berfungsi sebagai gudang ideologi dan fragmen-fragmen ideologis dengan mempertahankan kecenderungan dan unsur-unsur manifesto yang sama di banyak siklus pemilu.<sup>89</sup> Ideologi melekat pada partai politik dan dituangkan pada program-program partai. Pilihan ideologi menjadi dasar pembeda antarpartai. Ideologi juga menjadi modal partai politik dalam menciptakan preferensi bagi masyarakat sekaligus menjadi pembeda antarpartai. Selain itu, ideologi juga menjadi dasar pergerakan bagi sebuah partai politik sehingga partai dapat mengambil sikap politis secara jelas.

Ideologi dalam partai politik memiliki berbagai makna, di antaranya:<sup>90</sup> (1) Ideologi sebagai idealisasi masyarakat, bermakna ideologi memiliki pemahaman akan kondisi ideal bagi masyarakat yang ingin dicapai atau dicita-citakan; (2) Ideologi sebagai sistem kepercayaan dan norma, berarti menjadi dasar pengikutnya untuk berpikir, bersikap, dan bertindak dalam menghadapi berbagai persoalan, serta pemikiran yang mampu meyakinkan pendukungnya akan kebenaran (*truthfulness*); (3) Ideologi sebagai bahasa, simbol, dan mitos, berarti memaknai sesuatu yang abstrak dengan bahasa sehingga bisa diimplementasikan; (4) Ideologi

---

89 Vassallo, Francesca dan Clyde Wilcox. *Op.cit.*, hlm 694

90 Firmanzah. *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia., hlm 104.

sebagai identitas partai, yakni sebagai karakteristik bagi partai politik untuk membedakannya dari partai lainnya.

Partai politik mengemas dan mempromosikan ide-ide bagi sistem politik dan menggunakan platform mereka berfungsi sebagai gudang ideologi.<sup>91</sup> Partai politik kerap diartikan sebagai kumpulan orang yang memiliki kesepakatan akan suatu ide untuk diwujudkan menjadi kebijakan sosial dan politik. Partai politik di Indonesia terdiri dari beberapa organisasi dan masing-masing partai memiliki ide yang berbeda-beda dalam penyelenggaraan pemerintahan. Edmund Burke mendefinisikan partai sebagai kumpulan orang-orang yang bersatu mengampanyekan kepentingan nasional untuk usaha bersama mereka, di atas prinsip-prinsip tertentu yang mereka semua sepakati.<sup>92</sup> Edmund Burke memaknai ideologi sebagai prinsip atas kesepakatan bersama yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan cita-cita bersama. Ideologi merupakan identitas bagi partai politik dan sebagai karakteristik yang membedakannya dengan partai lainnya. Ideologi partai dipandang sebagai karakterisasi sistem keyakinan yang merasuk ke jantung identitas partai.<sup>93</sup>

Ideologi bersifat abstrak dan mengarah kepada sesuatu yang konseptual. Partai politik perlu melakukan *materialism* ideologi politik yang terdiri dari platform partai dan isu politik, untuk menerjemahkan ideologi yang konseptual menjadi sesuatu yang nyata, sehingga bisa digunakan untuk mengatasi hal-hal nyata di masyarakat. Platform partai dapat diwujudkan dalam *blue*

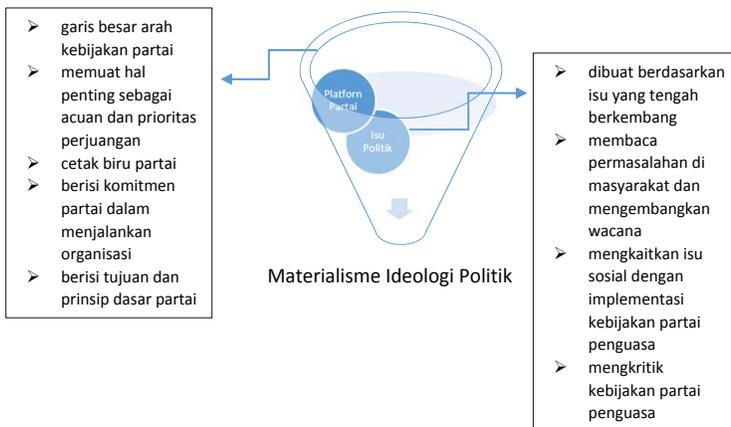
---

91 Vassallo, Francesca dan Clyde Wilcox. *Op.cit.*, hlm 682.

92 *ibid.*,

93 *ibid.*,

*print* yang berisikan garis besar kebijakan, acuan dan prioritas perjuangan, komitmen dalam menjalankan pengorganisasian, dan prinsip-prinsip dasar dari partai politik. Platform harus dapat tercermin dalam program kerja partai yang menjadi buah dari politik ide yang dituangkan dalam bentuk program, sehingga menjadi lebih nyata bagi masyarakat.



Gambar 4.7 *Materialisme Ideologi Politik* sumber Firmanzah, hlm 125

Partai politik membuat isu politik dengan mengembangkan wacana dari permasalahan yang tengah terjadi di masyarakat. Isu politik hanya dapat dikembangkan oleh partai dengan cara mengkaitkan isu sosial dengan implementasi kebijakan partai penguasa. Partai mengembangkan isu-isu sosial yang menjadi permasalahan bagi banyak orang, dikaitkan dengan implementasi kebijakan pemerintah, hingga mampu membangun sebuah isu politik, yang kemudian digunakan sebagai senjata untuk melakukan kritik terhadap penguasa. Isu politik ini mencerminkan bahwa partai politik yang menjadi oposisi memainkan politik ide.



*Gambar 4.8 Bagan Terciptanya Isu Politik,  
sumber: Firmanzah, hlm 128*

Kemampuan mengembangkan isu politik inilah yang dapat menjadi nilai jual dari partai politik ideologis seperti PKS. Jika PKS mampu bermain dengan baik dalam mengembangkan isu politik melalui jalan mengkaitkan isu sosial dan implementasi kebijakan, maka PKS mampu memengaruhi kebijakan dengan memberikan kritik. Kelihaihan partai politik dalam membangun isu politik inilah yang masih sangat minim di Indonesia, padahal kemampuan partai politik dalam mengembangkan ide untuk mengkritik dan menyelesaikan permasalahan di masyarakat akan lebih berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat.

PKS memiliki keunggulan akan kerekatannya dengan massa pendukung tradisional karena keberhasilannya mengelola organisasi politik. Kemampuan melaksanakan manajemen sumber daya ditunjukkan dengan kaderisasi yang tersistem dengan baik. Melalui sistem kaderisasi bertahap, ide partai dalam berpolitik disampaikan kepada kader. Kader dapat memahami apa yang menjadi cita-cita partai sehingga mampu menjadi kader yang sesuai dengan kehendak partai dan dapat mencerminkan ideologi partai di masyarakat umum.

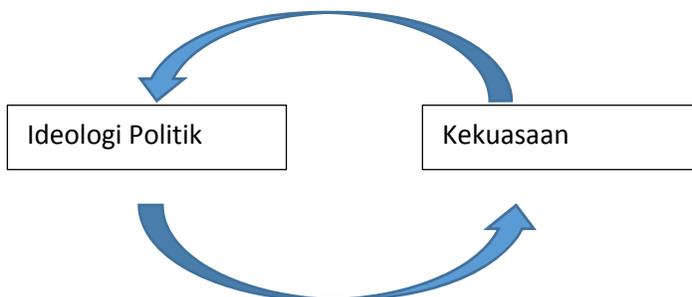


*Gambar 4.9 Urutan Logika Pikir Terobosan untuk PKS,  
sumber: analisa penulis.*

Keseriusan PKS membentuk kader yang militan membuat PKS memiliki massa dengan militansi yang tinggi atau dengan kata lain memiliki pemilih tradisional. Tetapi dalam sejarah pengorganisasian partainya, untuk memperluas basis pendukung dan memperbanyak perolehan suara di pemilu, PKS mulai menggeser strategi partai dengan mengungkapkan dirinya sebagai partai terbuka, bahwa PKS merupakan partai milik siapa saja. Hal tersebut terlihat gamblang pada strategi kampanye PKS menjelang pemilu 2009. Strategi PKS menjadi partai terbuka justru membuatnya menelan ideologi yang telah diperjuangkan dan diturunkan kepada para kadernya. Hal tersebut terjadi karena PKS berfokus pada perolehan kursi.

PKS memiliki kekuatan pada ideologi dan basis massa yang loyal, maka PKS dapat melaksanakan strategi politik ide. Dengan kekuatan organisasi dan loyalitas basis massa yang telah terbangun, kekuatan menerjemahkan ideologinya dengan memperkuat pengemasan ide, wacana, dan platform untuk dilempar ke publik bisa menjadi senjata PKS dalam memperoleh kekuasaan. Ideologi tidak perlu disamarkan dengan mengampanyekan diri sebagai partai terbuka demi meningkatkan suara. Ideologi seharusnya diposisikan sebagai kekuatan untuk memperoleh kekuasaan

sehingga partai dapat lebih berpengaruh dalam pengambilan kebijakan.



*Gambar 4.10 Ideologi dan Kekuasaan,  
sumber: Firmanzah 2011, hlm 91*

Ideologi politik dan kekuasaan memiliki keterkaitan, sebab ideologi politik bisa menjadi *tools* atau instrumen untuk mencapai kekuasaan.<sup>94</sup> Tetapi, kondisi masyarakat di tengah arus demokrasi prosedural menilai bahwa kekuasaan hanya dapat diperoleh dengan banyaknya suara di pemilu. Hal tersebut menyebabkan banyak partai politik terpeleset pada permainan politik kursi, hingga mengabaikan jati diri partai sesungguhnya demi memperoleh suara sebanyak-banyaknya. Kekuasaan dengan perolehan suara yang besar akhirnya dipandang sebagai kemenangan mutlak dan tujuan utama dalam sistem politik. Padahal perjuangan perebutan kekuasaan harus diawali dengan agenda politik yang jelas. Kekuasaan seharusnya ditempatkan sebagai sarana dan instrumen untuk mewujudkan cita-cita politik

---

94 Firmanzah.2011.*Op.cit.*,hlm 91

sesuai dengan ideologi politik yang diyakini, bukan sebaliknya, menjadikan kekuasaan sebagai cita-cita politik.<sup>95</sup>

## **B.2. Partai Demokrat Membangun Organisasi**

Popularitas Susilo Bambang Yudhoyono sebagai tokoh partai mendahului kepopuleran dari partainya sendiri. Popularitas ini kemudian dikelola partai sehingga memiliki orientasi pada *vote seeking*, tanpa kaderisasi yang tersistem seperti halnya PKS. Dari pembahasan di bab sebelumnya, dilihat dari organisasinya, Partai Demokrat dapat dikatakan sebagai partai yang belum selesai terbentuk, sebab segala proses pembentukan partai dilakukan serba cepat dan dalam waktu singkat. Partai mengandalkan personalistik SBY yang pada perjalanannya menyebabkan partai menjadi rapuh. Hal tersebut ditunjukkan dengan penurunan perolehan suara partai yang tajam di pemilu 2014 setelah banyak permasalahan internal partai yang menerpa pascapemilu 2009. Berbeda bila dibandingkan dengan PKS yang sama-sama sempat diterpa permasalahan internal, namun tidak mengalami penurunan suara yang cukup jauh, bahkan cenderung stagnan.

Partai Demokrat harus membangun organisasinya agar mampu keluar dari dilema. Keunggulan partai ini adalah dominan pada wajah partai di jabatan publik karena kemampuannya mengelola popularitas, sehingga dapat memobilisasi suara dari konstituen. Mempertahankan kejayaan dengan perolehan suara yang tetap tinggi menjadi tantangan bagi partai ini. Dalam konteks Partai Demokrat yang tidak memiliki pengikat sosial dengan massanya, sebab kekaburan ideologi demi kepentingan pragmatis

---

95 *ibid.*, hlm 104

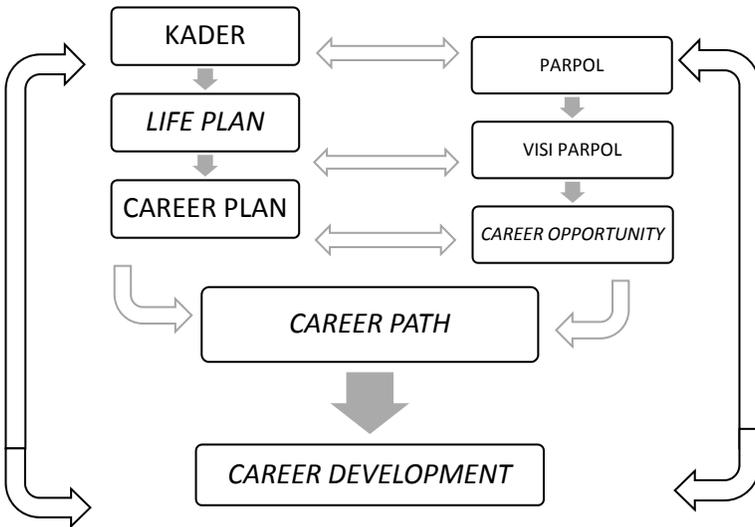
membuat partai kesulitan melihat siapa massa tradisional partai. Ditambah lagi dengan kepentingan-kepentingan pribadi yang dibawa masing-masing kader yang dapat menjadi duri di dalam tubuh partai. Partai Demokrat memerlukan kemampuan organisasi untuk dapat mengontrol kadernya dan menekan kepentingan pribadi yang dibawa masing-masing kadernya.

Membentuk dan memperkuat wajah partai di pusat selanjutnya menjadi pekerjaan rumah bagi partai Demokrat. Partai harus menebus kesalahan akan kelahiran partai yang prematur. Dalam partai politik, SDM yang memiliki kredibilitas, integritas, kemampuan dan keahlian berpolitik yang tinggi amat diperlukan.<sup>96</sup> Kualitas kader akan memengaruhi kinerja organisasi partai, sehingga tercipta hubungan yang saling mendukung, bukan tumpang tindih antara kepentingan partai dengan kepentingan personal kader. Jika ingin keluar dari dilema yang membelenggunya, partai Demokrat harus mampu menjamin kadernya melalui fase kaderisasi yang mendorong kader untuk lebih memahami cita-cita bersama dari partai dan memiliki kemampuan politisi serta berintegritas tinggi sehingga tidak mudah terpeleset dalam jurang korupsi demi kepentingan pribadi. Apabila partai Demokrat mampu menyinergikan antara visi partai dan kader dengan sistem kaderisasi yang lebih tertata, maka kader dapat menjadi aset partai dan organisasi akan menjadi lebih kokoh.

---

96 *ibid.*, hlm 142

## Manajemen SDM dalam Partai Politik



Gambar 4.11 Manajemen SDM dalam Partai Politik sumber Firmanzah.2011., blm 144.

Bagan di atas menunjukkan partai dan kader harus menyinergikan antara *life plan* dan *vision political party*. Kader sebagai manusia memiliki rencana dalam kehidupan, sedangkan partai memiliki visi yang menjadi cita-cita mulia untuk diwujudkan. Kader akan memiliki rencana dalam karir kepartaian, dan partai politik sebagai organisasi harus mampu mengembangkan karir dari kader hingga terwujud *career path* yang selanjutnya mengarah pada *career development*. Dengan menawarkan jenjang karir yang mana saling menguntungkan antara partai dan kader, akan membantu mengokohkan pengorganisasian partai. Dengan demikian, partai tidak semata-mata melaksanakan rekrutmen

untuk memenuhi prasyarat, melainkan untuk mendapatkan kader yang mampu memberikan timbal balik positif bagi partai.

Sistem manajemen SDM yang demikian akan sangat sesuai apabila diterapkan oleh Partai Demokrat. Dengan menyelaraskan kepentingan partai dan kepentingan individu, maka partai dapat memiliki nilai tawar lebih tinggi bagi kader. Partai memiliki tawaran kepada individu untuk penjenjangan karir dan dapat memberikan intervensi bagi kader agar berjalan selaras dengan visi dan misi partai. Partai kemudian tidak semata-mata menjadi kendaraan bagi personal yang memiliki modal finansial saja, melainkan personal yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas dalam melaksanakan pengorganisasian.

### **Tabel Terobosan Keluar dari Dilema bagi PKS dan Partai Demokrat:**

<b>Kriteria Terobosan / Partai</b>	<b>PKS</b>	<b>Partai Demokrat</b>
<b>Problema</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesulitan memperluas basis sosial</li> <li>• Terjebak pada orientasi politik kursi</li> <li>• Ideologi menjadi kabur dan mengancam pengakaran yang sudah dibangun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partai rapuh karena hanya mengandalkan personalistik</li> <li>• Pengorganisasian partai lemah</li> <li>• Partai tidak mampu mengintervensi kader</li> </ul>

- Gagasan**
- Mengembangkan gagasan politik ide
  - Materialisme ideologi politik: platform partai dan isu politik
- Aksi**
- Partai peka pada isu-isu sosial di masyarakat dan memperhatikan implementasi kebijakan pemerintah
  - Dengan mengkaitkan isu sosial dan implementasi kebijakan pemerintah partai dapat memiliki isu politik. Kemampuan menciptakan isu politik dapat menjadi manifestasi dari pengembangan politik ide PKS.
- Membangun organisasi
  - Membangun sistem manajemen SDM bersimbiosis mutualisme antara partai dan kader
  - Penting untuk membangun organisasi dan kuncinya ada pada kader. Sehingga mengembangkan SDM yang berkualitas dan memiliki loyalitas menjadi kunci pengorganisasian partai.
  - Sistem manajemen SDM menawarkan jenjang karir yang jelas bagi kader. Partai dan kader memiliki hubungan memberi dan menerima.
  - Partai memiliki kekuatan untuk mengintervensi kader apabila tidak sesuai dengan visi dan misi partai

- Goal**
- Memobilisasi massa
  - Mengambil peran di jabatan publik dengan kemampuan memberikan gagasan, membangun wacana dan isu politik.
  - Memperkuat pengorganisasian partai yang sejak awal lemah
  - Memiliki kader yang bukan hanya menumpang untuk kekuasaan melainkan juga berkontribusi pada kemajuan partai.

*Tabel 4 2 Terobosan bagi PKS dan Partai Demokrat,  
sumber: analisa penulis.*



# BAB V

## PENUTUP

**D**alam menjalankan organisasinya, partai politik selalu dihadapkan pada berbagai pilihan yang bisa jadi, membuat partai yang bersangkutan berada pada dilema. PKS dan Partai Demokrat merupakan contoh partai untuk memahami keterkaitan antara pilihan politik dan dilema partai. Melalui pilihan politik dari dua partai yang memiliki karakteristik dan corak yang berbeda, studi ini menunjukkan bahwa setiap pilihan dari masing-masing partai memiliki konsekuensi yang harus dipenuhi. Ketika partai-partai tersebut tidak mampu memenuhi konsekuensi dari pilihan politiknya, partai dihadapkan pada situasi yang dilematis. Konsekuensi-konsekuensi itu tidak dapat dielakkan karena adanya serangkaian hal yang memang tidak bisa dipenggal, baik itu di organisasi pusat, ketika menjabat jabatan publik, maupun di akar rumput.

PKS dan Partai Demokrat memilih strategi politik yang berbeda, tetapi sama-sama terjebak dalam kondisi dilematis karena ketidakmampuannya membayar konsekuensi dari pilihan politik yang diambil. PKS memilih sebagai partai ideologis, sedangkan Partai Demokrat memilih menjadi partai pragmatis.

Pilihan tersebut membawa kondisi dilematis, di mana PKS kesulitan memperluas basis massa karena dibatasi oleh garis ideologinya dan Partai Demokrat yang mengutamakan dimensi elektoral dalam pengorganisasiannya mengabaikan membangun organisasinya. Untuk mengatasi hambatan yang dihadapinya, PKS kemudian mengambil strategi menjadi partai terbuka untuk menjangkau suara pemilih dari berbagai latar belakang. Namun pilihan tersebut justru membuat partai menelan ideologinya sendiri. Sedangkan pada Partai Demokrat sejak awal mengambil strategi menjual personalistik SBY untuk terus mendongkrak popularitas partai dan mengabaikan membangun organisasi, sehingga memiliki partai yang rapuh. Hal tersebut terlihat dari penurunan elektabilitas partai pascapartai mengalami konflik internal dan jajaran anggota partai di dewan terjerat kasus korupsi.

Tiga wajah partai: di pusat, di jabatan publik, dan akar rumput yang lekat dengan pengorganisasian partai bukan hanya dipahami sebagai unsur, melainkan prasyarat yang harus dipenuhi bagi keberlangsungan partai politik. Ketiga wajah partai saling terkait dan memengaruhi. Ketika komponen yang ada pada setiap kaitan wajah partai tidak mampu dipenuhi, akan membawa partai dalam kondisi yang dilematis. Dalam pengorganisasian partai akan selalu ditemukan pada dilema, tetapi jika partai telah mampu memenuhi komponen di setiap kaitan pada wajah partai, akan meminimalisir munculnya dilema yang mengancam kemampuan partai untuk *survive*.

Pada setiap prosesnya, partai dihadapkan pada pilihan untuk menjadi idealis atau pragmatis. Di satu sisi partai mempertimbangkan iklim politik dan pemilih, sehingga terkadang menjadi pragmatis dinilai menjadi pilihan yang tepat

agar partai dapat *survive*, karena dianggap mudah dan cepat untuk menyelesaikan satu permasalahan yang dihadapi oleh partai. PKS maupun Partai Demokrat sama-sama terjebak dalam pilihan pragmatis demi kekuasaan: PKS menelan ideologinya sendiri demi memperluas basis massa dan Partai Demokrat memiliki partai yang rapuh karena hanya mengandalkan kekuatan personalistik. Padahal partai semestinya meletakkan secara sejajar antara orientasi kekuasaan dan orientasi untuk *survive*, sehingga kecenderungan partai untuk dapat terjebak dalam kondisi yang dilematis akan lebih kecil.

PKS dan Partai Demokrat belum mampu memenuhi komponen yang ada pada setiap kaitan di tiga wajah partai, sehingga terjebak dalam kondisi dilematis. Kedua partai tersebut hanya kuat pada salah satu kaitan: PKS kuat dengan kaitan wajah di pusat dan akar rumput, sedangkan Partai Demokrat kuat dengan kaitan wajah di jabatan publik dan akar rumput. Hal tersebut menunjukkan bahwa PKS dan Partai Demokrat hanya menjadikan satu kaitan dalam wajah partai sebagai penopangnya. PKS hanya bertumpu pada kekuatan di akar rumput yang telah berhasil dikelola oleh wajah di pusat, sedangkan Partai Demokrat bertumpu pada kekuatan di akar rumput yang berhasil dikelola oleh wajah di jabatan publik.

Apabila partai hanya kuat pada satu kaitan, maka pengorganisasiannya akan mengalami gangguan. PKS yang merupakan partai ideologis dan membangun basis massa militan dengan kekuatan ideologinya, terjebak dalam kondisi dilematis ketika harus tetap idealis tetapi kesulitan memperluas basis massanya. Kemudian mengambil keputusan pragmatis yakni mengumumkan dirinya menjadi partai terbuka membuat partai

menelan ideologinya sendiri. PKS menyamakan garis ideologi yang selama ini sebagai pembatas hubungan dengan konstituen di luar basis massa tradisionalnya. PKS bertindak pragmatis guna mendulang suara, untuk memenuhi tujuannya memiliki kekuasaan pada wajah partai di jabatan publik. Pengelolaan dilema PKS untuk bisa kuat pada wajah di jabatan publik justru membuatnya tidak konsisten akan pilihan politiknya.

Hal yang tidak jauh berbeda terjadi pada Partai Demokrat, dimana sejak awal menempatkan diri sebagai partai *catch-all* dan mampu memiliki popularitas dalam waktu cukup singkat, terjebak dalam kondisi dilematis ketika kadernya justru mencoreng citra partai. Konflik internal partai yang tak terbendung dan kader-kadernya yang terjerat berbagai kasus korupsi akhirnya meruntuhkan partai ini. Partai Demokrat terlena dengan kekuasaan yang diperoleh melalui popularitas tanpa menyadari popularitas dapat dengan mudah menurun ketika partai tidak mampu memenuhi ekspektasi yang diberikan padanya. Hal tersebut terjadi karena partai tidak memiliki kekuatan di sisi organisasi, sehingga partai bertindak pragmatis dengan menggunakan personalistik sebagai tameng dari segala permasalahan yang diterima oleh partai.

PKS dan Partai Demokrat sama-sama terjebak dalam muara permasalahan karena tidak mampu membayar konsekuensi dari pilihannya. Logika dasar PKS dalam pilihan politiknya adalah membangun organisasinya dari bawah atau tingkat dasar. Berdasarkan wajah PKS di organisasi, PKS memiliki misi membentuk kader yang militan dan ideologinya difungsikan sebagai pengikat sosial antara partai dan kadernya. Logika yang coba dibangun PKS adalah membangun organisasi yang

mengakar di akar rumput, agar tidak mudah jatuh meski mendapat berbagai permasalahan, diantaranya kemampuan PKS mengelola permasalahan-permasalahan internal.

PKS mencoba membangun partai kader ideologis. Tetapi gagasan partai kader ideologis yang diusungnya masih tanggung. PKS yang membangun organisasinya dari dasar dan mengandalkan kader, seharusnya tidak hanya berfokus pada politik kursi, melainkan memperkuat kader-kadernya dengan menguasai politik ide. Ideologi memang menjadi tantangan PKS dalam menambah basis massanya, sehingga kelemahan tersebut harus diimbangi dengan kemampuan partai dalam mengolah ide: membangun sebuah partai sebagai pengusung ide. Kemampuan membangun isu politik dan memengaruhi partai lain akan membawa PKS untuk memiliki kekuatan pada wajah partai di jabatan publik.

Partai Demokrat memiliki logika dasar membangun organisasinya dari atas atau puncak dengan mengelola popularitas yang dimiliki oleh tokohnya yang dianggap karismatik. Kelahiran Partai Demokrat tidak dapat dipungkiri untuk mendukung Susilo Bambang Yudhoyono maju menjadi presiden di pemilu 2004. Popularitas SBY lebih dulu melejit dibandingkan dengan popularitas Partai Demokrat, hingga seiring waktu popularitas partai mengikuti dengan pasti di balik SBY. Pembentukan partai pun dilakukan dalam waktu singkat dan mengandalkan jaringan dari para pendirinya yang merupakan kaum akademisi dan pengusaha. Perolehan suara yang cukup tinggi di pemilu 2004 dan melejit naik menjadi partai pemenang di pemilu 2009 membuat Partai Demokrat menjadi partai muda yang mampu berkuasa.

Partai Demokrat berambisi menjadi penguasa tetapi mengabaikan organisasinya, sehingga menjadikan partainya rapuh. Keunggulan Partai Demokrat dalam mengelola popularitas, ternyata tidak cukup membantu dalam memperkuat organisasinya. Modal popularitas untuk menarik konstituen tersebut seharusnya diimbangi dengan organisasi yang kuat. Partai memusatkan diri pada tokoh SBY, baik dalam misi meningkatkan elektabilitas ataupun manajemen partai. Hal tersebut ditunjukkan dengan SBY yang selalu menduduki posisi sentral partai. Partai Demokrat perlu memiliki sistem pengelolaan partai, baik sistem rekrutmen, sistem kaderisasi, ataupun sistem pengelolaan konflik. Dengan pengorganisasian yang tersistem, maka partai dapat mengurangi ketergantungannya pada tokoh. Partai Demokrat harus mulai serius membangun kadernya untuk dapat membangun organisasinya agar memiliki penjangkaran di akar rumput.

Kasus dilema PKS dan Partai Demokrat menunjukkan bahwa kekuatan pada salah satu wajah partai tidak cukup untuk membuat partai bertahan di panggung politik. Wajah partai di sisi lainnya pun harus diperlakukan secara seimbang. PKS tidak cukup hanya dengan mengandalkan akar rumput, tetapi juga perlu membangun ide untuk dapat memiliki kekuasaan pada wajah partai di jabatan publik. Sedangkan untuk Partai Demokrat, kekuatan personalistik saja tidak cukup untuk dapat *survive* di panggung politik, sehingga juga harus membangun organisasinya.

# DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Boroma, Suhendro.2010.*Sejarah dan Kemenangan Partai Demokrat*.Jakarta: Jala Permata.
- Budiardjo, Miriam.2003.*Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta:Gramedia.
- Edward,Djoni.2006.*Efek Bola Salju PKS*.Bandung: PT Syaamil Cipta Media.
- Firmanzah.2007.*Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*.Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.
- Firmanzah.2010.*Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik Pembelajaran Pemilu 2009*.Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Firmanzah.2011.*Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*.Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Haris, Syamsudin.2014.*Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*. Jakarta:Yayasan Pustaka Obor.

- Heidar, Knut.2014.*Keanggotaan dan Partisipasi Partai*, dalam Richard S.Katz dan William Crotty(ed.),Handbook Partai Politik.Bandung: Penerbit Nusa Media, pp 493-518.
- Iin Nur Insaniwati.2002. *Mohamad Roem: Karier Politik dan Perjuangannya, 1924-1968*,Magelang: Yayasan Indonesiatera.
- Koirudin. 2004.*Profil Pemilu 2004 : Evaluasi Pelaksanaan, Hasil dan Perubahan Peta Politik Nasional Pasca Pemilu Legislatif 2004*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhtadi, Burhanuddin. 2012.*Dilema PKS: Suara dan Syariah*. Jakarta:Kepustakaan Populer Gramedia.
- Pamungkas, Sigit.2011.*Partai Politik: teori dan praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- Pippa Norris.2014.*Recruitmen*, dalam Richard S.Katz dan William Crotty(ed.),Handbook Partai Politik.Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Rahmat, Imdadun M. 2008.*Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*.Yogyakarta: PT LKis Pelangi Aksara Yogyakarta.
- Rathomy, Arief Ikhsan.2007.*PKS dan HTI Geneologi dan Pemikiran Demokrasi*.Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan.
- Riyanto, Guruh Dwi dan Pebriansyah Ariefana.2014.*Rapor Capres Analisis dan Prediksi Menuju RI I*.Yogyakarta: Galang Pustaka.
- Sernetko,Holli A.2014.*Partai di Abad Media*, dalam Richard S.Katz dan William Crotty(ed.), Handbook Partai Politik. Penerbit Nusa Media, Bandung.

- Singh, Bilveer dan Zuly Qodir.2015.*Gerakan Islam Non-Mainstream dan Kebangkitan Islam Politik di Indonesia*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Torcal, Mariano dan Scott Mainwaring.2014.*Institusionalisasi Sistem Partai dan Teori Sistem Partai Setelah Demokratisasi Gelombang Ketiga*, dalam Richard S.Katz dan William Crotty(ed.),*Handbook Partai Politik*.Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Urbaningrum, Anas.2010.*Revolusi Sunyi “Mengapa Partai Demokrat dan SBY Menang dalam Pemilu 2009?”*. Bandung:Penerbit Mizan.
- Vassallo, Francesca dan Clyde Wilcox.2014.*Partai Sebagai Pengusung Ide*,dalam Richard S.Katz dan William Crotty(ed.),*Handbook Partai Politik*.Penerbit Nusa Media, Bandung.
- White, John Kenneth.2014.*Apakah Partai Politik Itu?*. dalam Richard S.Katz dan William Crotty(ed.),*Handbook Partai Politik*.Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Wiegand,Krista E..2016.*Bombs and Ballots: Governance by Islamist Terrorist and Guerilla Groups*.New York:Routledge.
- Wolnetz, Steven B.2014.*Sistem Partai dan Jenis-Jenis Sistem Partai*. dalam Richard S.Katz dan William Crotty(ed.),*Handbook Partai Politik*.Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Yudha,Hanta.2010.*Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema ke Kompromi*,Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.

## **Jurnal**

- Haris, Syamsudin.2006.Demokratisasi Partai dan Dilema Sistem Kepartaian di Indonesia.makalah dalam Seminar Nasional “Mencari Format Baru Pemilu dalam Rangka Penyempurnaan UU Bidang Politik”.
- Honna. Jun.2012.*Inside The Democrat Party: Power, Politics and Conflict in Indonesia’s Presidential Party*, dalam Jurnal South East Asia research,20,4, pp 473-489.
- Janda, Kenneth.1983.Cross National Measures of Party Organizations and Organizational Theori.dalam European Journal of Political Research, pg 319-332.Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V.
- Katz and Mair.1993.*The Evolution of Party Organizations in Europe: The Three Faces of Party Organization*, Journal The American Review of Politics, Vol 14.
- Program Studi S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah.*Memperkuat Parpol di Tiga Wajah*.Universitas Gadjah Mada.Yogyakarta.
- Sebastian, Leonard C.2012.*Special Focus Political Parties and Democracy in Indonesia*,dalam Jurnal South East Asia Research,20,4,pp 463-471
- Tanuwidjaja, Sunny.2012.*PKS in post-Reformasi Indonesia Catching the catch-all and moderation wave*, Journal South East Asia Research,20,4,pp533-549.

## **Dokumen**

- KPU.*Daftar Calon Terpilih Anggota DPR RI Hasil Pemilu Tahun 2009*.(Online).( <http://www.kpu.go.id/dmdocuments/>

- DAFTAR\_ANGGOTA\_DPR\_2009.pdf, diakses pada 27 Mei 2016).
- KPU.*Hasil Pemilu tahun 2014*.(Online).( <http://www.pemilu.com/hasil-pemilu-2014/>, diakses pada 29 Mei 2016).
- KPU.*Modul Hasil Pemilu*.(Online).( [http://kpu.go.id/dmdocuments/modul\\_1d.pdf](http://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1d.pdf), diakses pada 27 Mei 2016).
- KPU.*Persentase Hasil Perolehan Partai*.(Online). ( <http://www.kpu.go.id/index.php/persentasepartai>, diakses pada 27 Mei 2016).
- KPU.*Persentase Hasil Perolehan Partai*.(Online). ( <http://www.kpu.go.id/index.php/persentasepartai>, diakses pada 27 Mei 2016).
- Lembaga Survey Indonesia.2015.*Partai Politik di Mata Publik “Evaluasi atas Kinerja Partai dan Regenerasi Politik*. Jakarta:Rilis Surnas LSI.
- Partai Demokrat.2010.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tahun 2010.
- Partai Demokrat.2015.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tahun 2015.
- PKS.2005.Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera tahun 2005.
- PKS.2015.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera tahun 2015
- SK KPU Nomor 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 yang Memenuhi Ambang Batas dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Secara

Nasional dalam Pemilu Anggota DPR Tahun KPU.*Modul Hasil Pemilu.*(Online).([http://kpu.go.id/dmdocuments/modul\\_1d.pdf](http://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1d.pdf), diakses pada 27 Mei 2016).

## Skripsi

Adiputra, Dimas.2015.*Politik Pangan Partai Politik (Studi tentang Peran PDIP dalam Membuat Tawaran Kebijakan Pangan di Kabupaten Klaten melalui Pendekatan Tiga Wajah Organisasi Partai).* Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Kamil, Faisal Arief.2013.*Kegagalan Perluasan Basis Politik Partai Keadilan Sejahtera melalui Iklan Politik.*Skripsi.Universitas Gadjah Mada.

## Thesis

Nasiwan. 2015. *Dilema Transformasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) thesis dilema traansformasi PKS.*Thesis. Universitas Gadjah Mada.

## Artikel

Alfian, M.Alfan. *Daya Kritis dan Survivalitas PKS.*(Online).(<http://lipsus.kompas.com/jalanjalan/read/2010/06/16/05465341/Daya.Kritis.dan.Survivalitas.PKS>, diakses pada 8 September 2016).

Jati, Wasito Raharjo.2015.*Memutus Gerontokrasi Partai.*(Online). (<http://www.tempo.co/read/kolom/2015/01/07/1876/Memutus-Gerontokrasi-Partai>, diakses pada 15 September 2016).

Siregar, Arfanda.2012..*Masa Depan Partai Islam*.(Online). (<http://koran.tempo.co/konten/2012/10/18/289341/Masa-Depan-Partai-Islam>, diakses pada 28 September 2016).

Wasito Raharjo Jati.2015..*Memutus Gerontokrasi Partai*.(Online). (<http://www.tempo.co/read/kolom/2015/01/07/1876/Memutus-Gerontokrasi-Partai>, diakses pada 15 September 2016)



# Indeks

## A

Aspirasi 19

## D

Demokrasi 15, 19, 22, 24, 84,  
103, 104

## I

Ideologi x, xii, 30, 37, 46, 50, 68,  
84, 85, 86, 88, 89, 93, 101,  
103, 104

Ideologi politik 89

Iklan politik 48

Isu politik 86

## K

Kaderisasi xi, 41, 57, 69

Kebijakan 78, 82, 108

## L

Legitimasi 16, 103

Loyalitas 10, 76, 78

## O

Oligarki x, 63

## P

Partai Demokrat iv, v, vi, vii, x, xi,  
xii, xiii, 2, 3, 4, 5, 13, 14,  
26, 27, 30, 31, 32, 33, 35,  
46, 51, 52, 53, 54, 55, 56,  
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,  
64, 65, 67, 68, 69, 70, 71,  
72, 79, 80, 81, 82, 83, 84,  
90, 91, 93, 95, 97, 98, 99,  
100, 101, 102, 103, 105,  
107

Partai politik xi, 1, 8, 13, 17, 19,  
44, 84, 85, 86

Pemilu xiii, 4, 16, 20, 21, 23, 26,  
28, 31, 45, 51, 52, 54, 61,  
103, 104, 105, 106, 107,  
108

Perubahan politik 1

Pilihan politik 69

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) iv,  
v, vi, vii, x, xi, xii, xiii, 2, 3,  
4, 5, 13, 14, 26, 27, 30, 31,  
32, 33, 35, 46, 51, 52, 53,  
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,  
61, 62, 63, 64, 65, 67, 68,  
69, 70, 71, 72, 79, 80, 81,

82, 83, 84, 90, 91, 93, 95,  
97, 98, 99, 100, 101, 102,  
103, 105, 107  
Popularitas x, 51, 52, 54, 68, 82,  
90, 101

## **R**

Regenerasi 18, 107

## **S**

Sistem multipartai 1

# Tentang Penulis



**Desideria Setya Mentari**, lahir di Lampung pada 23 Mei 1994. Ia merupakan alumnus Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, menempuh pendidikan dasar sampai SMP di Lampung Utara, melanjutkan bersekolah di SMAN 1 Kota Mungkid, Kab. Magelang. Selama kuliah, Ia mempelajari studi kepartaian di peminatan intermediary, hingga mendorongnya membuat karya akademis mengenai pengorganisasian partai politik. Dalam studi ilmu politik, penulis menyukai kutipan dari Clinton Rossiter “Tidak ada Demokrasi tanpa Politik, dan tidak ada Politik tanpa Partai.” Kini, Ia tengah memulai karir sebagai birokrat di Dirjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM. Penulis dapat dihubungi melalui [desideria.s.mentari@gmail.com](mailto:desideria.s.mentari@gmail.com).

